

BAB I

PENDAHULUAN

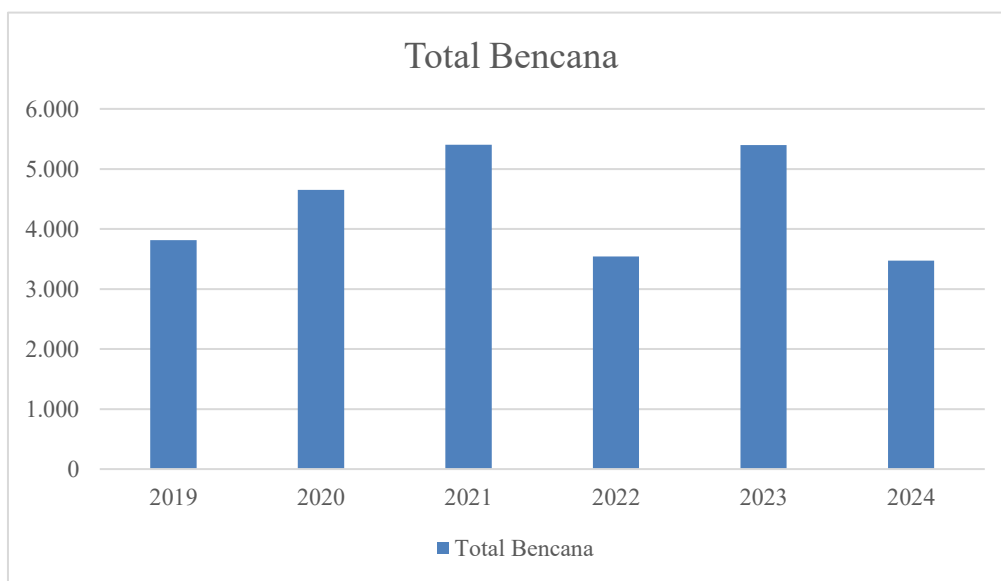
1.1. Latar Belakang

Bencana merupakan peristiwa ekstrem yang dapat disebabkan oleh faktor alam maupun aktivitas manusia, yang terjadi ketika masyarakat belum memiliki kesiapan yang memadai untuk menghadapinya. Suatu kejadian dapat dikategorikan sebagai bencana apabila terdapat interaksi antara ancaman (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*). Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan kekeringan banyak terjadi di negara berkembang dengan tingkat pendapatan menengah, termasuk Indonesia (BNPB, 2008). Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa korban jiwa, tetapi juga kerusakan infrastruktur serta gangguan terhadap perekonomian. BNPB mencatat bahwa kejadian bencana terus meningkat, baik bencana hidrometeorologi maupun bencana geologi, di mana lebih dari 90% korban meninggal dunia disebabkan oleh gempa bumi dan tsunami (BNPB, 2017).

Secara umum, penyebab bencana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bencana yang terjadi secara alami dan bencana yang dipicu oleh aktivitas manusia. Bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan angin kencang, sedangkan bencana akibat aktivitas manusia antara lain disebabkan oleh penggundulan hutan, pembakaran lahan, pembangunan di wilayah rawan bencana, serta pengelolaan lingkungan yang tidak berkelanjutan. Meskipun bencana sering terjadi secara tiba-tiba dan sulit diprediksi, tanda-tanda awalnya tetap dapat

dikenali. Oleh karena itu, upaya mitigasi bencana menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Mitigasi bencana merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengantisipasi, mengurangi, dan menangani dampak bencana agar kerugian dapat diminimalkan (Bakornas, 2007). Upaya mitigasi harus dilakukan secara tepat dan efektif agar mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat (Aminuddin, 2013), serta didukung oleh kesiapan sumber daya dan pemahaman dalam pemanfaatannya agar respons terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat dan efisien (Dodon, 2013).

Gambar 1. 1. Data Terkait Bencana Alam di Indonesia Setiap Tahunnya



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Berdasarkan diagram batang yang ditampilkan merupakan representasi visual dari data jumlah bencana alam di Indonesia setiap tahunnya selama periode 2019 hingga 2024. Data ini berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lembaga resmi pemerintah yang bertugas mencatat dan menangani seluruh bentuk kejadian bencana di Indonesia. Grafik tersebut menyajikan tren jumlah

bencana yang bersifat fluktuatif, mencerminkan kondisi alam dan cuaca yang dinamis di wilayah Indonesia. Pada tahun 2019, jumlah bencana alam berada di angka sekitar 3.800 kejadian. Tahun ini menunjukkan jumlah yang relatif sedang dibanding tahun-tahun berikutnya. Bencana yang dominan pada tahun tersebut umumnya adalah banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor, yang memang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia terutama saat musim penghujan.

Memasuki tahun 2020, jumlah bencana mengalami peningkatan signifikan menjadi sekitar 4.700 kejadian. Peningkatan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh fenomena La Nina yang memperparah curah hujan dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi. Curah hujan ekstrem memicu peningkatan kasus banjir dan tanah longsor di banyak daerah. Tahun 2021 menjadi tahun dengan jumlah bencana tertinggi sepanjang periode ini, yaitu sekitar 5.400 kejadian. Peningkatan ini didorong oleh berbagai faktor seperti kondisi cuaca ekstrem, frekuensi gempa bumi yang lebih tinggi, serta bencana hidrometeorologi yang terus berulang. Banyak daerah mengalami musibah dalam skala besar, dan sebagian besar bencana masih didominasi oleh faktor cuaca.

Pada tahun 2022, terjadi penurunan drastis dalam jumlah bencana, turun menjadi sekitar 3.500 kejadian. Penurunan ini bisa dikaitkan dengan kondisi iklim yang lebih stabil, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya mitigasi dan penanggulangan risiko bencana. Teknologi deteksi dini yang semakin baik juga turut membantu mengurangi dampak dan frekuensi kejadian. Tahun 2023 kembali menunjukkan lonjakan jumlah bencana yang cukup tajam, naik lagi ke angka sekitar 5.400 kejadian, menyamai rekor tertinggi seperti

pada tahun 2021. Hal ini menandakan bahwa kondisi cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi kembali melanda Indonesia. Banjir dan angin kencang menjadi jenis bencana yang paling banyak terjadi sepanjang tahun tersebut.

Tahun 2024 menunjukkan tren penurunan kembali, dengan jumlah bencana berada di kisaran 3.400 kejadian. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan membaiknya kondisi cuaca serta keberhasilan berbagai program mitigasi bencana yang telah dijalankan. Hal ini juga menunjukkan bahwa intervensi pemerintah, edukasi publik, dan kesiapsiagaan masyarakat memiliki pengaruh signifikan dalam menekan jumlah kejadian bencana. Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan bahwa jumlah bencana alam di Indonesia cenderung mengalami naik-turun yang tajam dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan betapa kompleks dan sensitifnya kondisi geografi dan iklim Indonesia terhadap perubahan lingkungan. Sebagian besar bencana yang tercatat adalah bencana hidrometeorologi, yang memang menjadi tantangan utama bagi negara dengan iklim tropis seperti Indonesia. Data ini dapat menjadi dasar penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus meningkatkan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, serta adaptasi terhadap risiko bencana yang terus mengancam.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi dalam penanggulangan bencana, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Regulasi ini menandai perubahan paradigma penanganan bencana yang sebelumnya bersifat reaktif menuju pendekatan yang lebih preventif melalui upaya mitigasi untuk menekan risiko bencana. Dalam kerangka perencanaan pembangunan, penanggulangan bencana

juga telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, khususnya pada aspek pengelolaan bencana dan kelestarian lingkungan. Pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah melalui perencanaan pembangunan yang memasukkan kebijakan penanganan bencana, sebagaimana ditegaskan dalam konsep mitigasi bencana. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang mendefinisikan mitigasi sebagai upaya pengurangan risiko bencana melalui pembangunan fisik serta peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat. Mitigasi bencana terdiri atas mitigasi struktural dan nonstruktural, di mana mitigasi nonstruktural menekankan pada pemberdayaan dan edukasi masyarakat agar lebih siap menghadapi ancaman bencana.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Semarang menetapkan kebijakan penanggulangan bencana melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam Pasal 18 peraturan tersebut, penanggulangan bencana dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana. BPBD Kota Semarang berperan sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah daerah (Sakti Wijayanto & Marlina, n.d.). BPBD memiliki peran utama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta koordinasi penanggulangan bencana, mulai dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPBD bekerja sama dengan berbagai pihak terkait,

baik di tingkat daerah maupun nasional, seperti BNPB, TNI, kepolisian, dan dinas kesehatan (Putri et al., 2024).

Peran strategis BPBD yang menuntut koordinasi lintas aktor tersebut menjadi semakin penting ketika dihadapkan pada karakteristik wilayah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi dan bersifat kompleks. Kondisi inilah yang tercermin di Kota Semarang yang tidak hanya menghadapi ancaman banjir rob secara berulang, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika geografis dan lingkungan yang memperberat upaya mitigasi dan penanggulangannya. Kota Semarang merupakan wilayah yang paling krusial dibanding wilayah pesisir lain di Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki karakteristik risiko banjir rob yang lebih kompleks dan berat karena merupakan simpul antara faktor alam, aktivitas ekonomi nasional, dan tekanan pembangunan perkotaan. Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa penurunan muka tanah di Semarang mencapai 3–13 cm per tahun, dengan wilayah Semarang Utara sebagai yang tercepat di Jawa Tengah (Kementerian ESDM, 2017). Angka ini jauh lebih tinggi dibanding wilayah pesisir lain seperti Pekalongan atau Demak. Kondisi tersebut diperparah oleh kenaikan muka air laut global akibat perubahan iklim, yang menurut IPCC (2021) meningkat rata-rata 3,7 mm per tahun. Kombinasi dua faktor ini menjadikan banjir rob di Semarang bersifat kronis, berulang, dan progresif, bukan sekadar kejadian musiman. BNPB juga mengklasifikasikan Kota Semarang sebagai salah satu wilayah dengan risiko bencana hidrometeorologi tinggi di Indonesia, khususnya rob dan banjir pesisir (BNPB, 2023).

Selain faktor fisik, Kota Semarang dipilih karena memiliki signifikansi strategis nasional, terutama di Kelurahan Tanjung Mas yang menjadi lokasi Pelabuhan Tanjung Emas, pelabuhan utama di Pantai Utara Jawa. Bappenas (2020) menegaskan bahwa gangguan pada kawasan pelabuhan Semarang berdampak langsung pada rantai logistik nasional, distribusi barang, dan stabilitas ekonomi regional Jawa. Data BPBD Kota Semarang mencatat bahwa banjir rob di Tanjung Mas pada 2022–2023 berdampak pada lebih dari 2.200 kepala keluarga dan menggenangi kawasan ekonomi vital akibat jebolnya tanggul (BPBD Kota Semarang, 2023). Media nasional seperti Antara secara konsisten melaporkan bahwa rob di Semarang menyebabkan terhambatnya aktivitas bongkar muat pelabuhan, kerusakan infrastruktur, dan kerugian ekonomi berulang, kondisi yang tidak ditemukan secara sekompleks di daerah pesisir Jawa Tengah lainnya (Antara, 2023).

	
Gambar 1. 2. Kejadian banjir di wilayah Kelurahan Tanjung Mas	Gambar 1. 3. Kejadian banjir rob di daerah pelabuhan Tanjung Mas
<i>Sumber : Detik News (2022)</i>	<i>Sumber : Semarang News (2025)</i>

Gambar di atas menunjukkan kondisi banjir dan banjir rob yang terjadi di wilayah Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang. Pada Gambar 1.2 terlihat genangan banjir yang merendam kawasan permukiman dan area sekitar pelabuhan,

menandakan tingginya kerentanan wilayah ini terhadap bencana hidrometeorologis. Sementara itu, Gambar 1.3 menggambarkan kejadian banjir rob yang secara langsung berdampak pada aktivitas masyarakat, di mana warga harus melintasi genangan air untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Kedua gambar tersebut memperlihatkan bahwa banjir dan banjir rob tidak hanya bersifat temporer, tetapi menjadi permasalahan berulang yang memengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan mobilitas penduduk. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana banjir rob tidak hanya menimbulkan genangan air, tetapi juga mengganggu aktivitas sehari-hari penduduk di daerah terdampak.

Banjir rob tidak hanya menyebabkan genangan air, tetapi juga mengganggu aktivitas sehari-hari penduduk di daerah terdampak. Warga yang tinggal di kawasan pesisir sering mengalami kesulitan dalam beraktivitas, terutama ketika banjir rob terjadi dalam durasi yang panjang dan dengan intensitas yang tinggi. Kondisi ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti terganggunya mobilitas, proses belajar-mengajar di sekolah, serta akses terhadap layanan kesehatan. Selain itu, lingkungan yang terus-menerus lembab akibat genangan air meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit, gangguan kesehatan akibat air yang terkontaminasi. (Semarang et al., n.d.).

Tabel 1. 1. Data Masyarakat yang Terdampak Banjir Rob di Kelurahan Tanjung Mas

Wilayah	RW Terdampak	Ketinggian Air (cm)	Dampak
Kecamatan Semarang Utara	RW 12, RW 13, RW 14, RW 15, RW 16	40–70 cm	Banjir rob merendam permukiman
Kelurahan Tanjung Mas	RW 16	60–75 cm	Aktivitas warga terganggu
Kampung Tambakrejo	RW 16	60–75 cm	80 KK terdampak, 15 KK mengungsi ke daerah lebih tinggi
Kelurahan Tanjung Mas	Seluruh wilayah kelurahan tanjung mas yang terdampak	±300 hektar tergenang	2.252 KK terdampak akibat jebolnya tanggul

Sumber : Kompas, Radar Semarang, BPBD Kota Semarang

Berdasarkan tabel 1.1 menjelaskan bahwa Kecamatan Semarang Utara menjadi salah satu wilayah yang terdampak banjir rob, termasuk Kelurahan Tanjung Mas. Banjir ini merendam lima RW di Tanjung Mas, yakni RW 12 hingga RW 16, dengan ketinggian air berkisar antara 40 cm hingga 70 cm. Pada Juni 2022, sekitar 80 kepala keluarga (KK) di Kampung Tambakrejo, RW 16, mengalami banjir rob (Kompas, 2022). Genangan air di RW 16 menghambat aktivitas warga, dengan ketinggian mencapai 60–75 cm, dan kondisi terparah terjadi pada sore hari. Akibatnya, sebanyak 15 KK memilih pindah ke wilayah yang lebih tinggi (Radar Semarang, 2022). Banjir rob ini diperparah oleh jebolnya tanggul akibat tingginya debit air laut, mengakibatkan genangan air yang meluas hingga ±300 hektar dan berdampak pada 2.252 KK di Kelurahan Tanjung Mas (BPBD Kota Semarang, 2022). Handoyo et al. (2016) mengutip pernyataan Astuti (2009) bahwa Kecamatan Semarang Utara merupakan salah satu wilayah di Kota Semarang yang kerap

mengalami banjir rob, masalah ini telah berlangsung lama dan terjadi secara tahunan. Dengan topografi yang memiliki kemiringan 0-2%, sebagian besar wilayahnya berada di pesisir utara Pulau Jawa, sehingga sangat rentan terhadap kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Selain itu, banjir pasang di daerah ini juga dipengaruhi oleh gelombang air pasang serta penurunan permukaan tanah. Faktor ketinggian tanah berkontribusi pada munculnya genangan banjir rob, di mana muka air laut lebih tinggi dibandingkan daratan. Ketika air pasang terjadi, wilayah yang cenderung landai akan tergenang (Handoyo et al., 2016).

Dalam hal ini yang perlu digaris bawahi bahwa Tanjung Mas merupakan wilayah yang sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagian besar di laut ataupun pesisir pantai, dan juga di pelabuhan Tanjung Mas itu sendiri. Oleh sebab itu, perlunya mitigasi dalam wilayah Tanjung Mas itu sendiri karena banjir rob di pelabuhan ini bisa mengakibatkan beberapa kerusakan seperti kerusakan bangunan, sarana dan prasarana, sehingga bisa menghambat seperti kegiatan terutama kegiatan yang terdapat pada wilayah Tanjung Mas. Seperti di pelabuhan bisa menghambat seperti kegiatan bongkar muat, dan pergerakan arus barang. Jika dibiarkan terus menerus tentunya akan membuat ketinggian air laut semakin meningkat sehingga membuat daerah yang terkena imbas banjir rob khususnya di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas itu sendiri sebagai tempat perputaran ekonomi di Kota Semarang itu sendiri

Meskipun *Collaborative Governance* dinilai relevan sebagai pendekatan mitigasi banjir rob, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas proses kolaborasi yang berlangsung antar pemangku kepentingan. Dalam kajian

administrasi publik, *Collaborative Governance* tidak hanya dipahami sebagai bentuk kerja sama antar aktor, tetapi sebagai suatu proses bertahap yang sangat menentukan keberhasilan kolaborasi itu sendiri. Ansell dan Gash (2008) menegaskan bahwa efektivitas *Collaborative Governance* ditentukan oleh rangkaian proses yang meliputi dialog tatap muka (*face to face dialogue*), pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses kolaborasi (*commitment to process*), pemahaman bersama (*shared understanding*), serta hasil sementara (*intermediate outcomes*). Setiap tahapan tersebut saling berkaitan dan bersifat kumulatif, sehingga kegagalan pada satu tahapan dapat berdampak pada tidak optimalnya keseluruhan proses kolaborasi. Perspektif ini menjadi relevan dalam konteks mitigasi banjir rob di Kota Semarang, mengingat permasalahan banjir rob merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor saja. Kolaborasi antar sektor menjadi kebutuhan utama karena pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya memiliki peran yang saling melengkapi dalam merumuskan dan melaksanakan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam pendekatan *Collaborative Governance*, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam perumusan kebijakan serta penyediaan infrastruktur pendukung mitigasi, sementara masyarakat berperan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif, seperti menjaga lingkungan dan mendukung program mitigasi yang dijalankan. Di sisi lain, sektor lain yang terlibat dapat berkontribusi melalui dukungan pendanaan, pengembangan teknologi ramah lingkungan, serta pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap bencana. Sinergi antarpemangku kepentingan tersebut memungkinkan proses kolaborasi

berjalan secara lebih terstruktur, partisipatif, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan adanya kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing aktor. Dengan demikian, penerapan *Collaborative Governance* tidak hanya meringankan beban pemerintah, tetapi juga membangun komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tangguh terhadap bencana, sehingga solusi mitigasi banjir rob yang dihasilkan tidak bersifat sementara, melainkan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi Kota Semarang (Hasna & Darumurti, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permasalahan dalam *Collaborative Governance* sering kali terletak pada ketidakseimbangan pelaksanaan tahapan proses kolaborasi. Hidayatullah (2023) dalam studi penanganan banjir di Kota Semarang menemukan bahwa dialog tatap muka dan komitmen antar aktor relatif berjalan baik, namun pemahaman bersama antar pemangku kepentingan masih lemah akibat perbedaan persepsi mengenai penyebab dan solusi banjir. Temuan serupa juga disampaikan oleh Hazimah Latifah dkk. (2024) yang menyatakan bahwa meskipun forum kolaborasi telah terbentuk, pembangunan kepercayaan dan konsistensi komitmen antar instansi belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga hasil kolaborasi cenderung bersifat jangka pendek dan reaktif. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak dapat diukur hanya dari adanya kerja sama formal, melainkan dari kualitas proses yang dijalankan.

Dalam pelaksanaannya upaya mitigasi bencana banjir di Kota Semarang masih belum berjalan secara optimal, Hal ini terlihat dari hasil penelitian Permatasari dkk. (2012) mengungkapkan bahwa Kota Semarang menghadapi

berbagai tantangan dalam mengelola risiko bencana banjir, seperti kurang optimalnya pengawasan dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan BPBD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan BPBD Kota Semarang menghadapi tantangan pengawasan yang signifikan, meskipun telah memetakan 89 titik TPS rawan banjir dan rob pada awal 2024. Demikian, dari 6 pompa utama yang tersedia hanya tiga yang berfungsi dengan optimal selebihnya sering tersumbat sampah sehingga mengurangi efektivitas penanganan genangan. Selain itu, akses masyarakat dan petugas terhadap teknologi deteksi dan pemantauan rob melalui IoT atau sistem kamera ambang masih sangat terbatas. Misalnya, teknologi “*tide-eye*” berbasis IoT baru diterapkan pada beberapa titik semisal rumah pompa Yos Sudarso dan Sungai Babon namun belum merata di seluruh lokasi terdampak (Antara, 2024).

Kurangnya struktur sistem komando dan koordinasi yang solid dalam proses rehabilitasi serta penyebaran informasi menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya mitigasi banjir rob di Kota Semarang. Kondisi ini tercermin dari lemahnya sinergi antara instansi pemerintah, lembaga penanggulangan bencana, serta pihak-pihak terkait di tingkat lokal. Dalam beberapa kasus, penanganan rob tidak berjalan secara terpadu karena belum adanya mekanisme komando yang terintegrasi untuk merespons secara cepat dan efektif. Akibatnya, informasi terkait ancaman rob, peringatan dini, serta rencana evakuasi sering kali tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, masih ditemukan tumpang tindih kewenangan antara dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan BPBD sendiri, yang menyebabkan respons menjadi lambat dan tidak sinkron. Selain itu,

rendahnya literasi kebencanaan masyarakat juga menjadi faktor yang diperburuk oleh tidak optimalnya penyebaran informasi dari pihak otoritas (BPBD, 2021).

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mitigasi bencana merupakan salah satu faktor krusial yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan pemerintah, khususnya dalam konteks penanganan banjir rob di wilayah pesisir seperti Tanjung Mas, Kota Semarang. Meskipun berbagai program telah diluncurkan oleh pemerintah, mulai dari pembangunan tanggul laut, sistem drainase terpadu, hingga penyuluhan kebencanaan, namun tingkat partisipasi dan kesiapsiagaan masyarakat masih tergolong rendah, Kota Semarang, pada tahun 2023 hanya sekitar 37% warga di kawasan pesisir yang pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi mitigasi bencana secara formal (BPBD, 2023). Beatrix (2020) juga menyoroti bahwa kurangnya pengetahuan dan pengalaman masyarakat dalam mitigasi bencana menjadi salah satu penyebab mengapa upaya pemerintah dalam penanggulangan banjir masih belum sepenuhnya sejalan dengan kesiapsiagaan masyarakat.

Kondisi ini menyebabkan air tidak dapat tertampung dengan baik dalam sistem drainase yang tersedia, sehingga meningkatkan risiko banjir, terutama saat curah hujan tinggi (www.kompas.id, 2023). Situasi ini mengindikasikan bahwa sistem drainase di Kota Semarang masih belum memadai dalam mengatasi potensi banjir. Ketidaktepatan dalam perencanaan dan pengelolaan drainase dapat menyebabkan genangan air yang lebih sering terjadi dan memperburuk dampak banjir di beberapa wilayah. Langkah-langkah strategis dari pemerintah sangat diperlukan, seperti peningkatan kapasitas saluran air, pemeliharaan berkala, serta

edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan drainase agar tidak tersumbat oleh sampah atau sedimentasi (Indra et al., n.d.).

Kelurahan Tanjung Mas sebagai wilayah pesisir yang terdampak banjir rob secara berulang, berbagai aktor telah terlibat dalam upaya mitigasi, mulai dari BPBD, dinas terkait, pemerintah kelurahan, hingga masyarakat. Namun demikian, fakta bahwa banjir rob masih terus terjadi menunjukkan bahwa proses *Collaborative Governance* yang dijalankan belum sepenuhnya efektif. Hingga saat ini, belum terdapat kajian yang secara spesifik mengidentifikasi tahapan proses *Collaborative Governance* mana yang paling dominan mengalami hambatan dalam mitigasi banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas. Padahal, identifikasi tersebut menjadi penting sebagai dasar perumusan kebijakan dan strategi kolaborasi yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis secara mendalam proses *Collaborative Governance* berdasarkan kerangka Ansell dan Gash, guna mengetahui tahapan proses yang paling menentukan dan paling membutuhkan penguatan dalam konteks mitigasi banjir rob di Kota Semarang. Dari hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas strategi yang telah diterapkan serta menjadi bahan pertimbangan bagi perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, pertanyaan penelitian yang harus ditanggapi yakni **“Mengapa Proses *Collaborative Governance* dalam Mitigasi Permasalahan Bencana Banjir Rob di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang belum berjalan secara maksimal?”**

1.2. Identifikasi Masalah

Bencana merupakan peristiwa ekstrem yang berasal dari alam atau ulah manusia, dan seringkali dihadapi tanpa kesiapan memadai. Mitigasi bencana menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak dan kerugian, sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Di tingkat daerah, Kota Semarang telah mengatur penanggulangan bencana melalui Perda No. 13 Tahun 2010. Namun, banjir rob masih menjadi persoalan serius, terutama di Kelurahan Tanjung Mas, yang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat pesisir. Dalam hal ini penelitian ini ingin melihat atau mengobservasi dari berbagai persoalan yaitu:

1. Lemahnya pengawasan instansi dan akses teknologi terbatas, serta pemahaman bersama antar pemangku kepentingan masih lemah, kepercayaan dan komitmen antar instansi belum sepenuhnya berjalan dalam penanganan banjir rob di Kota Semarang.
2. Kurangnya struktur sistem komando dan koordinasi dalam rehabilitasi serta penyebaran informasi menghambat proses mitigasi banjir rob di Kota Semarang.
3. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait mitigasi bencana menyebabkan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program dan kebijakan menjadi kurang optimal, terlebih dengan tantangan tambahan berupa luasnya wilayah terdampak dan kondisi cuaca yang sulit diprediksi.

1.2.1. Rumusan Masalah

Banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara, terjadi setiap tahun akibat pasang laut, penurunan tanah, dan perubahan iklim. Dampaknya merusak infrastruktur dan menurunkan kualitas hidup. Meski ada upaya penanggulangan, banjir tetap terjadi dan memburuk. Penelitian ini merumuskan permasalahan banjir rob di wilayah tersebut.

1. Bagaimana proses kolaborasi antara pemerintah, sektor lainnya yang terlibat, dan masyarakat dalam *Collaborative Governance* untuk penanganan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang?
2. Bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat pada proses *Collaborative Governance* dalam penanganan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang?

1.2.2. Tujuan Penelitian

Banjir rob merupakan masalah lingkungan yang kerap melanda wilayah pesisir seperti Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara, akibat kombinasi pasang air laut, penurunan muka tanah, dan aktivitas manusia. Dampaknya meliputi kerusakan infrastruktur, pencemaran, hingga penurunan kualitas hidup. Penanganannya memerlukan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini yaitu tentang.

1. Menganalisis proses penerapan *Collaborative Governance* dalam penanganan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang.

2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat proses *Collaborative Governance* dalam penanganan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang.

1.2.3. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian selesai dan didukung dengan data yang akurat, penulis berharap temuan penelitian ini dapat menjadi pengembangan teoritis bagi peneliti berikutnya dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya lembaga tempat penelitian dilakukan. Penulis berharap temuan penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis untuk hal-hal berikut:

1.2.3.1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan konsep *Collaborative Governance* dan studi kebijakan publik, khususnya dalam konteks mitigasi banjir rob melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya yang terlibat.

1.2.3.2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan efektivitas mitigasi banjir rob melalui penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang adaptif dan inovatif dalam kerangka tata kelola kolaboratif.

1.3. Kerangka Teori

1.3.1. Penelitian Terdahulu

No	PENELITI/TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Hendra Irawan Umabaihi, Nurliah Nurdin, Romli Arsyad, 2022	Menganalisis proses kolaborasi yang terjadi dalam penanggulangan banjir serta mencari model ideal dalam menangani banjir di kabupaten Kepulauan Sula	Dalam penelitian ini menggunakan teori <i>Collaborative Governance</i> yang dikemukakan oleh Ansell ang Gash (2007) dimana penanggulangan banjir dapat dilihat dari kondisi awal, Desain Kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif yang mempengaruhi proses kolaborasi.	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan Teknik pengambilan data berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi, dan ditinjau dari beberapa literatur serta infroman dari masyarakat lembaga yang terlibat didalamnya.	Dalam hal ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi belum berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari belum dilibatkannya pemangku kepentingan/ aktor yang lain dalam berkolaborasi, yaitu Akademisi atau perguruan tinggi.
2.	Alya Larasati Hasna, Awang Darumurti, 2023	Mengetahui bagaimana bentuk <i>Collaborative Governance</i> Pemerintah Pekalongan dan LSM BINTARI Foundation dalam memitigasi bencana banjir rob di Kota Pekalongan.	Dalam penelitian ini menggunakan teori Edward Deseve menyajikan 8 indikator untuk mengukur keberhasilan <i>Collaborative Governance</i> yakni <i>network structure</i> (Struktur Jaringan), <i>commitment to a common purpose</i> (komitmen terhadap	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber dan beberapa data yang didapat di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang berupaya untuk mengungkapkan suatu masalah dan	Bentuk <i>Collaborative Governance</i> yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dan LSM BINTARI Foundation diwujudkan kedalam beberapa program seperti kajian dan riset, pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana dan MCK Adaptif di wilayah Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara. Program tersebut telah berhasil mengurangi risiko yang

			tujuan bersama), <i>trust among the participants, governance</i> (kepercayaan di antara para peserta, tata kelola), <i>access to authority</i> (akses ke otoritas), <i>distributive accountability</i> (akuntabilitas distributif), <i>information sharing, dan access to resources</i> (berbagi informasi, dan akses ke sumber daya).	keadaan yang apa adanya, untuk itu dalam penelitian ini dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta tanpa hipotesis. Penulis menggunakan penelitian jenis ini karena penulis ingin menjelaskan secara mendalam mengenai bentuk <i>Collaborative Governancedalam</i> mitigasi bencana banjir rob di Kota Pekalongan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dan LSM BINTARI Foundation. Data primer pada penelitian ini merupakan data yang dikumpulkan dari peristiwa aktual yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui teknik wawancara dengan narasumber yakni Organisasi Pemerintah Kota Pekalongan yang terdiri dari BAPPEDA dan BPBD Kota Pekalongan dan juga LSM BINTARI Foundation sebagai subjek penelitian.	ditimbulkan oleh banjir rob. Meskipun demikian, adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki mengakibatkan bentuk program mitigasi banjir rob belum merata ke seluruh wilayah Kota Pekalongan.
--	--	--	---	--	--

3.	Evi Yunita Kurniaty, Khasan Effendy, Megandaru W. Kawuryan & Layla Kurniawati, 2024	Menjelaskan konsep <i>Collaborative Governance</i> dalam menghadapi bencana alam Gunung Sinabung di kabupaten Karo dapat dimaksimalkan pelayanan publik dalam penyelenggaraan bencana. Manfaat lain dengan adanya kolaboratif dalam mengatasi masalah bencana alam adalah pemerintah akan mendapatkan dukungan sumberdaya dari masyarakat dan sektor swasta. Terjaringnya aspirasi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, serta meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik (Hakim & Pakam, 2014; Ikhwan et al., 2020; Styawan & others, 2012)	Dalam penelitian ini menggunakan teori eori <i>Collaborative Governance</i> oleh Chris Ansell dan Alison Gash (2008) menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan aktor lainnya dalam pengambilan keputusan publik. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi setara, membangun kepercayaan, dan menciptakan solusi bersama melalui proses yang transparan dan inklusif. Dalam konteks kesiapsiagaan bencana Gunung Sinabung, pendekatan ini relevan untuk mengintegrasikan berbagai pihak dalam perencanaan dan penanganan bencana, mulai dari sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan, hingga pengelolaan pengungsian secara partisipatif.	Penelitian ini menggunakan makna, yang biasanya berkaitan dengan isu-isu sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini meliputi pengajuan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, pengumpulan data spesifik dari para partisipan, analisis data secara induktif membangun dari tema yang khusus ke tema yang umum, dan peneliti melakukan interpretasi atas makna dari data yang diperoleh. Laporan akhir dari penelitian ini memiliki struktur yang fleksibel (Cresswel, 2013). Data-data dikumpulkan melalui wawancara dan triangulasi serta kajian literature dan dianalisis secara kualitatif.	Dalam hal ini disimpulkan bahwa jangka menengah yaitu Desa Gung Pinto mendapatkan penilaian Ketangguhan Desa kategori Pratama. Temuan dalam penelitian ini dari 14 Desa yang sudah dibentuk, hanya 1 Desa yang bisa menjalankan proses kolaborasi dengan baik. Dengan rekomendasi perlunya proses pemberdayaan dalam <i>Collaborative Governance</i> dalam kesiapsiagaan bencana Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.
----	---	---	---	---	---

4.	Dea Apsari Pramudana Putri, 2024	Menganalisis bagaimana bentuk penerapan <i>Collaborative Governance</i> dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Lingkungan Lebak, Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini mencoba mengungkap keterlibatan berbagai pihak yang meliputi pemerintah daerah, masyarakat, serta dunia usaha, dalam upaya kolaboratif untuk mengurangi dampak banjir. Melalui pendekatan ini, peneliti ingin melihat sejauh mana ketiga elemen tersebut mampu bekerja sama dalam proses pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana.	Penelitian ini menggunakan teori <i>Collaborative Governance</i> dari Chris Ansell dan Alison Gash (2008), yang menekankan pengambilan keputusan bersama antara pemerintah dan aktor non-pemerintah melalui forum kolaboratif yang dilandasi dialog, komitmen, dan konsensus. Teori ini berpijak pada empat elemen utama, yaitu kondisi awal kolaborasi, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif yang mencakup komunikasi dan kesepahaman antar pihak.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder dalam menunjang hasil penelitian. Penelitian ini bertumpu pada teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Peneliti mewawancarai 22 informan kunci yang di dalamnya terdapat perwakilan dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan BPBD sebagai leading sektornya.	Kolaborasi antara pihak pemerintah, dunia usaha, dan kelompok masyarakat sudah terlaksana tetapi belum optimal sehingga perlu dilakukan pemaksimalan peranan pada tahapan preventif dan monitoring. Pihak pemerintah masih cenderung lebih dominan dibandingkan dengan dunia usaha dan kelompok masyarakat. Proses kolaborasi tersebut menghasilkan dua unit mesin pompa air permanen, plengsengan sungai, program normalisasi sungai, dan pelaksanaan apel satgas bencana yang beranggotakan seluruh stakeholder. Dalam pelaksanaan kolaborasi ini terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tidak membuang sampah atau limbah ke sungai, sulitnya akses alat berat berupa ekskavator menuju sungai, terkendalanya pengoperasian mesin pompa air, terjadinya alih fungsi komoditas tanaman perkebunan di daerah hulu, serta kondisi wilayah Lebak yang sangat rendah.
----	----------------------------------	---	--	---	---

5.	Vicky Alfitra Perdana, Ahmad Syafiqurrohman, Muhammad Noor Cahyadi Eko Saputro, Nita Aribah Hanif, Muhammad Miftahul Ahsan, Rahmawati Husein, 2021	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Tujuan lainnya adalah untuk memahami bagaimana manajemen kolaborasi dijalankan oleh kedua lembaga tersebut dalam situasi krisis serta menilai intensitas dan efektivitas tata kelola kolaboratif yang terbentuk.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Tujuan lainnya adalah untuk memahami bagaimana manajemen kolaborasi dijalankan oleh kedua lembaga tersebut dalam situasi krisis serta menilai intensitas dan efektivitas tata kelola kolaboratif yang terbentuk.	Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dari BPBD DIY dan MCCC PWM DIY menggunakan berbagai media seperti Zoom, telepon, dan WhatsApp. Data sekunder diperoleh dari studi literatur, dokumen, arsip, dan media sosial. Analisis data dilakukan dengan model interaktif: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.	Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara BPBD DIY dan MCCC PWM DIY berjalan efektif meski tanpa perjanjian formal. Melalui Posko Dukungan, keduanya bekerja sama dalam cipta kondisi, dekontaminasi, dan pemulasaran jenazah. Kolaborasi ini dibangun atas dasar kepercayaan, komunikasi informal, dan komitmen kemanusiaan, dengan dukungan MCCC berupa ambulans, relawan, rumah sakit rujukan, dan shelter. Meski ada kendala teknis, kerja sama ini mencerminkan praktik <i>Collaborative Governance</i> yang berhasil dalam penanganan pandemi.
6.	Muhammad Arif Hidayatullah, Hartuti Purnaweni, Teguh Yuwono, 2023	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses <i>Collaborative Governance</i> diterapkan dalam penanganan banjir di Kota Semarang. Selain	Penelitian ini menggunakan teori <i>Collaborative Governance</i> dari Chris Ansell dan Alison Gash (2007) dalam kariem (2021), yang menekankan pentingnya kerja sama antara	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan adalah	Proses kolaboratif dalam penanganan banjir di Kota Semarang berjalan baik, dengan indikator seperti dialog, kepercayaan, dan komitmen yang menunjukkan hasil positif. Namun, pemahaman bersama masih kurang optimal karena perbedaan persepsi antara masyarakat,

		itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam kebijakan penanggulangan banjir.	pemerintah dan aktor non-pemerintah dalam pengambilan keputusan publik. Teori ini berfokus pada empat komponen utama dalam proses kolaboratif: dialog tatap muka (<i>face to face dialogue</i>), pembangunan kepercayaan (<i>trust building</i>), komitmen terhadap proses (<i>commitment to process</i>), dan pemahaman bersama (<i>shared understanding</i>), yang semuanya diharapkan menghasilkan manfaat bersama (<i>intermediate outcomes</i>).	<i>purposive</i> dan <i>snowball sampling</i> , untuk memperoleh informan dari BPBD, Bappeda, DPU, masyarakat, dan sektor swasta. Data dianalisis menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.	swasta, dan pemerintah mengenai penyebab banjir. Faktor pendukung kolaborasi meliputi jaringan yang baik, komitmen, kepercayaan antar aktor, akses informasi, dan keterlibatan sumber daya manusia. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi kurangnya transparansi pemerintah, pembagian kewenangan yang tidak merata, serta masalah teknis dalam pengelolaan drainase yang terfragmentasi antar instansi.
7.	Nurlaila, 2023	Menganalisis <i>Collaborative Governance</i> terutama pada tahap pra bencana, dan sejauh mana kerjasama serta upaya-upaya yang telah dilakukan berbagai aktor untuk mengantisipasi bencana di Kabupaten Bima.	Penelitian ini menggunakan teori Ansell & Gash (2008) dengan pendekatan <i>Collaborative Governance</i> dalam manajemen prabencana di Kabupaten Bima. Pendekatan ini mengedepankan prinsip koordinasi, keterpaduan, kemitraan, dan pemberdayaan, serta melibatkan	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima, serta	Strategi penanggulangan bencana melalui penguatan aturan dan kapasitas kelembagaan yang difokuskan untuk mencapai penguatan kerangka Hukum penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peningkatan kapasitas serta akuntabilitas tata kelola penanggulangan bencana. Proses kerjasama ini juga telah mengintegrasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ke dalam rencana

			seluruh elemen masyarakat untuk penanggulangan bencana secara demokratis dan partisipatif. Badan Penanggulangan Bencana bertindak sebagai sektor pemimpin untuk mengimplementasikan program dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah melalui kerjasama lintas sektoral.	organisasi Pemerhati Lingkungan Hidup di Kabupaten Bima, lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus dan permasalahan yang terjadi. Subyek penelitian ini dipilih melalui teknik nonprobability sampling, dengan menggunakan teknik purposive sampling atau teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan aspek tertentu. Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi observation, wawancara dan dokumentasi	strategis dan rencana kerja tahunan seluruh SKPD. Pemerintah Daerah juga bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan hasil-hasil riset yang dapat diterapkan secara langsung oleh Pemerintah, individu dan keluarga seperti pembangunan rumah aman gempa, sumur resapan dan lainnya. Diharapkan dengan adanya beberapa riset terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Bima dapat menurunkan kerentanan daerah terhadap risiko multi bahaya.
8.	Hazimah Latifah, Herbasuki Nurcahyanto, AUFARUL MAROM, 2024	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses <i>Collaborative Governance</i> dalam menanggulangi bencana banjir yang terjadi di Kota Semarang serta	Penelitian ini mengacu pada konsep <i>Collaborative Governance</i> sebagaimana dijelaskan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menekankan pentingnya kerja	Penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Kota Semarang. Fokus dari penelitian ini adalah memahami proses kolaborasi	Proses <i>Collaborative Governance</i> dalam penanggulangan banjir di Kota Semarang dilakukan melalui tahapan seperti dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan antar stakeholder, peneguhan komitmen dalam dokumen rencana kontinjensi, dan

		mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan proses tersebut. Pendekatan ini diambil karena penanggulangan banjir tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kerja sama lintas instansi, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, agar tercipta sinergi dalam menghadapi masalah banjir yang terus berulang setiap tahun di wilayah ini.	sama formal antara sektor pemerintah dan non-pemerintah dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kegiatan publik. Kolaborasi ini dibangun melalui beberapa komponen utama, yaitu kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaboratif yang mencakup dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil sementara. Dalam teori ini, setiap komponen saling berkaitan dan	antar aktor dalam penanggulangan banjir serta mengenali hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Informasi yang dikumpulkan berasal dari data primer dan sekunder dengan pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yakni memilih responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan	koordinasi antar instansi. Hasil sementara menunjukkan sinergi dan komunikasi yang mulai terbentuk. Namun, kendala signifikan muncul dari faktor budaya, seperti ketergantungan pada prosedur dan keengganan mengambil risiko, serta faktor institusi, di mana struktur organisasi hierarkis dan pendekatan kaku terhadap SOP menghambat kelancaran kolaborasi.
--	--	--	---	---	--

			membentuk dasar dalam pencapaian tujuan kolaboratif. Keterlibatan aktif semua pihak sangat diperlukan untuk menjawab tantangan kompleks dalam penanggulangan bencana.	penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta menggunakan triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas temuan.	
9.	L W Lestari, N D M A Qibthia, I C Nugraha, M Qibtiyah, dan S Shafira, 2024	Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi penyebab banjir di Kelurahan Mangkang Wetan dan menganalisis mitigasi yang dilakukan melalui normalisasi sungai dan sistem peringatan dini banjir (FEWS). Selain itu,	Penelitian ini berlandaskan pada konsep mitigasi bencana yang mencakup upaya struktural seperti pembangunan fisik dan non-struktural seperti edukasi serta sistem peringatan dini. Dalam konteks banjir, normalisasi sungai meningkatkan kapasitas	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus di Kelurahan Mangkang Wetan. Data diperoleh dari observasi, wawancara, serta dokumen resmi dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara komparatif dengan praktik	banjir bandang di Kelurahan Mangkang Wetan masih sering terjadi dan menimbulkan kerusakan. Normalisasi sungai belum selesai sejak dimulai kembali pada 2020. Sistem peringatan dini FEWS telah diterapkan, namun terkendala perawatan, jangkauan, dan pembaruan data. Meski begitu, kolaborasi antara pemerintah, NGO, dan masyarakat sudah terbentuk, dengan peran aktif

		penelitian ini memberikan rekomendasi peningkatan efektivitas mitigasi berdasarkan studi perbandingan dari wilayah lain.	aliran air, sedangkan FEWS memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Konsep resiliensi komunitas dan modal sosial digunakan untuk menilai kesiapan masyarakat menghadapi bencana.	mitigasi banjir di wilayah lain, seperti Italia, China Utara, dan Malaysia, untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang ada dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan.	Kelurahan Siaga Bencana yang masih perlu ditingkatkan. Keberhasilan sistem serupa di daerah lain menunjukkan pentingnya sinergi dan dukungan sosial yang kuat.
10.	Tegar Wishnu Atmojo, Titin Rohayatin, Dadang Sufianto, 2025	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan konsep <i>Collaborative Governance</i> dalam penanggulangan bencana banjir di Sungai Ciliwung, Jakarta Timur. Fokus penelitian diarahkan pada peran serta kolaborasi	Penelitian ini didasarkan pada konsep <i>Collaborative Governance</i> yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penyelesaian permasalahan publik yang kompleks. Menurut teori dari Ansell dan Gash (2008), proses ini melibatkan empat tahap utama: kondisi awal,	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuannya adalah menggambarkan secara faktual, sistematis, dan akurat tentang bentuk kolaborasi yang terjadi di lapangan antara berbagai pemangku kepentingan. Data dikumpulkan melalui studi	Penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan banjir di Jakarta Timur melibatkan kerja sama antara BPBD, Dinas Sumber Daya Air, masyarakat, dan relawan. Kolaborasi ini terbentuk secara alami berdasarkan pembagian peran dan saling percaya. Pemerintah memimpin secara teknis, sementara masyarakat mendukung melalui gotong royong. Kepercayaan dibangun melalui kejujuran dan transparansi,

		antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam mengurangi risiko banjir secara efektif dan berkelanjutan.	kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, dan proses kolaboratif itu sendiri. Selain itu, aspek kepercayaan, kebersamaan, dan kekompakan menjadi fondasi utama keberhasilan kolaborasi. Kerangka ini digunakan untuk menilai praktik kolaboratif dalam konteks penanggulangan banjir di Jakarta Timur.	literatur, observasi, dan dokumentasi terhadap aktivitas lembaga-lembaga terkait penanganan banjir di wilayah Sungai Ciliwung.	kebersamaan melalui komunikasi rutin, dan kekompakan melalui koordinasi saat banjir terjadi. Meskipun cukup berhasil mengurangi dampak banjir, tantangan seperti pembebasan lahan dan keberlanjutan program masih perlu diatasi.
--	--	--	---	---	---

1.3.2. Administrasi Publik

Administrasi bukanlah sebuah kata atau istilah yang asing di telinga kita. Kata atau istilah ini sudah sering kita dengar dimana-mana. Kata atau istilah yang sesungguhnya telah ada dari sejak adanya peradaban manusia, apalagi di dalam kehidupan modern seperti masa sekarang ini. Hampir dalam setiap kegiatan kita sehari-hari, apalagi di dalam dunia pemerintahan. Bagian administrasi, ruang administrasi, seleksi administrasi, berkas administrasi, bahkan uang administrasi adalah istilah-istilah yang sering kita dengar. Misalnya, “Silakan serahkan berkas administrasi ke bagian administrasi”. “Anda silahkan langsung ke ruang administrasi”. “Salah satu tahapan dalam penerimaan pegawai adalah melalui seleksi administrasi”. “Uang administrasi dibayarkan langsung ke loket pembayaran”. Demikian pula halnya dengan istilah administrasi publik. Suatu istilah yang berasal dari kata *public administration*.

Ilmu administrasi publik merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang telah berkembang sejak lama dan telah banyak dimanfaatkan dalam praktik pemerintahan maupun pelayanan publik. Seiring dengan perkembangannya, berbagai teori serta konsep mengenai administrasi publik telah dikemukakan oleh para pakar di bidang tersebut. Salah satunya adalah pendapat dari Dimock, Dimock, dan Fox yang menyatakan bahwa administrasi publik dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Keban, 2014). Menurut Barton dan Chappel (dalam Keban, 2014), administrasi publik dapat dipahami sebagai aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah. Dengan kata lain, administrasi publik merujuk pada

seluruh bentuk tindakan yang dilakukan oleh aparatur negara dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, Nigro dan Nigro (dalam Keban, 2014) mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu bentuk kerja sama kolektif antara lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang memiliki peran penting dalam proses perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik. Secara etimologis, kata "administrasi" berasal dari bahasa Latin, yang terdiri dari dua bagian, yaitu "*ad*" dan "*ministrate*," yang memiliki arti "melayani" dan "memenuhi." Dalam bahasa Inggris, kata ini diterjemahkan menjadi "*administration*," yang menurut Atmosudirjo (dalam Meutia, 2017) mengacu pada rangkaian tindakan yang mencakup pengelolaan, kepemimpinan, pelaksanaan, serta pengaturan.

Intinya, administrasi mencakup kegiatan untuk mengarahkan dan memimpin suatu upaya demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, istilah "publik" berasal dari bahasa Inggris "*public*," yang mengacu pada sesuatu yang bersifat umum, melibatkan masyarakat luas, atau berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Menurut pandangan Nicholas yang dikutip oleh Harbani Pasalong (2010: 8), administrasi publik adalah kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan memperdalam pemahaman tentang pemerintahan dalam kaitannya dengan masyarakat yang dipimpinnya, serta mendorong kebijakan publik agar lebih tanggap terhadap kebutuhan sosial. Chandler dan Plano (dalam Pasalong, 2019) menyebutkan bahwa Dwight Waldo pada tahun 1968 mengartikan administrasi publik sebagai seni dan ilmu yang berfokus pada pengelolaan urusan publik dan pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan.

Definisi ini menekankan bahwa administrasi publik merupakan proses pengelolaan dan organisasi yang melibatkan manusia serta sumber daya lain untuk mencapai tujuan pemerintahan. Selain itu, Edward H. Litchfield (dikutip oleh Meutia, n.d.) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah studi mengenai cara pengaturan, pendanaan, kepemimpinan, dan pengelolaan tenaga kerja dalam lembaga pemerintah. Berdasarkan berbagai pandangan ini, administrasi publik dapat dipahami sebagai upaya penyelesaian masalah publik melalui perbaikan dalam organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintahan. Dengan demikian, administrasi publik mencakup kepentingan publik secara luas, yang melibatkan sektor pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat.

Awalnya, administrasi publik lebih banyak dipahami sebagai suatu praktik birokratis yang menekankan pada efisiensi, aturan, dan hierarki sebagaimana diwariskan dari model-model klasik seperti yang dikembangkan oleh Max Weber dan Frederick Taylor. Pendekatan ini menekankan struktur organisasi yang kaku, prosedur yang ketat, serta peran administrator sebagai pelaksana kebijakan yang ditentukan oleh atasan atau pembuat keputusan politik. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul ketidakpuasan terhadap model ini. Kritik utama datang dari ketidaksesuaian pendekatan birokratis dengan realitas masyarakat yang kompleks dan berubah dengan cepat. Administrasi publik dianggap terlalu kaku, lambat merespon perubahan, dan kurang memperhatikan nilai-nilai demokrasi, partisipasi masyarakat, serta keadilan sosial. Hal ini mendorong munculnya pemikiran baru

yang tidak hanya mempertanyakan efektivitas sistem birokrasi, tetapi juga mencoba menawarkan alternatif yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman.

Paradigma administrasi publik kemudian lahir sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Ia tidak lagi hanya melihat administrasi sebagai sekadar pelaksanaan kebijakan secara teknokratis, melainkan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh nilai, partisipasi publik, dan konteks sosial. Fokusnya bergeser dari sekadar efisiensi ke akuntabilitas, transparansi, pelayanan publik yang lebih manusiawi, dan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan. Dalam paradigma ini, peran masyarakat menjadi lebih aktif dan penting, sementara administrator publik diharapkan mampu menjadi fasilitator dan mediator, bukan hanya pelaksana perintah. Selain itu, perkembangan teori ilmu sosial, terutama dalam hal interdisiplineritas, juga turut mendorong lahirnya paradigma administrasi publik. Ilmu administrasi mulai menyerap konsep-konsep dari ilmu politik, sosiologi, ekonomi, hingga psikologi, untuk memahami secara lebih komprehensif bagaimana kebijakan publik dikelola dan dijalankan. Ini menunjukkan bahwa administrasi publik tidak lagi bisa dipisahkan dari konteks sosial dan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

1.3.3. Paradigma Administrasi Publik

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, paradigma dapat dipahami sebagai cara pandang mendasar yang didasari oleh nilai-nilai tertentu serta mencakup teori, konsep, asumsi, metodologi, atau pendekatan yang digunakan sebagai alat analisis dalam menghadapi suatu permasalahan, baik dalam

pengembangan ilmu maupun penyelesaian masalah praktis. Dengan pemahaman ini, penggunaan paradigma sebagai pendekatan analisis dalam kajian persepsi dan retrospeksi administrasi publik dianggap tepat, karena kajian ini bertujuan untuk meneliti sudut pandang para ahli terhadap masalah dan solusi dalam bidang administrasi publik seiring dengan dinamika perkembangannya.

Dalam perkembangan dinamis di bidang ilmu administrasi publik, muncul berbagai paradigma yang mencerminkan perubahan serta perbedaan dalam hal tujuan, teori, metodologi, dan nilai-nilai yang mendasarinya. Beberapa paradigma "klasik," seperti yang dirumuskan oleh Nicholas Henry dan George Frederickson, sangat dikenal oleh para akademisi administrasi publik. Selain itu, paradigma "baru" *Reinventing Government* yang dikembangkan oleh David Osborne dan Ted Gaebler juga mendapatkan perhatian khusus di kalangan ilmuwan dan praktisi administrasi publik. Dari Indonesia, Mustopadidjaja turut berkontribusi dengan mencoba merumuskan teori dasar atau landasan teori yang mengungkapkan konsep-konsep utama dari berbagai paradigma tersebut.

1.3.3.1 Konsepsi Paradigma Nicholas Henry (Anwarudin, 2004)

Nicholas Henry merumuskan lima paradigma administrasi publik yang berdasarkan pada fokus kepentingan dan locus atau lokasi institusional di mana administrasi dipraktikkan. Lima paradigma tersebut meliputi: (1) Dikotomi Politik-Administrasi, (2) Prinsip-Prinsip Administrasi, (3) Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik, (4) Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik, dan (5) Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik, (6) *Governance*.

1. Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926)

Menekankan pemisahan antara politik dan administrasi dalam pemerintahan. Politik berkaitan dengan kebijakan, sementara administrasi berfokus pada organisasi, kepegawaian, dan anggaran di dalam birokrasi. Paradigma ini juga menyoroti pentingnya pendekatan ilmiah dalam administrasi publik serta kebutuhan untuk menjadi disiplin yang bebas dari nilai-nilai politik. Tokoh-tokoh penting dalam paradigma ini meliputi Woodrow Wilson, Leonard White, Frank Goodnow, dan Dwight Waldo.

2. Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Menganggap fokus sebagai aspek terpenting, sementara locus dianggap kurang relevan. Administrasi publik dipandang memiliki sifat universal, yang berarti prinsip-prinsipnya dapat diterapkan dalam berbagai konteks organisasi tanpa memperhatikan budaya, fungsi, atau lingkungan. Tokoh-tokoh seperti Henry Fayol, Mary Parker Follett, Frederick Taylor, serta Luther Gulick dan Lyndall Urwick yang mempopulerkan prinsip POSDCORB termasuk dalam paradigma ini.

3. Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950- 1970)

Melihat administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik, di mana administrasi mendukung kekuasaan politik dalam menjalankan pemerintahan secara efisien. Fokusnya adalah pada birokrasi pemerintahan. Tokoh-tokoh dalam paradigma ini termasuk Chester Barnard, Herbert Simon, Allen Schick, dan Robert Dahl.

4. Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik (1956-1970)

Lebih menekankan pada pengembangan teknik manajemen dan teori organisasi sebagai bagian dari administrasi publik. Locus dianggap tidak penting dalam paradigma ini. Keahlian dan spesialisasi dalam administrasi publik mulai berkembang, dengan tokoh-tokoh seperti Keith Henderson, James March, dan Herbert Simon berkontribusi dalam paradigma ini.

5. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-sekarang)

Memperluas ruang lingkup locus administrasi publik dari sekadar birokrasi menjadi teori organisasi secara umum. Fokusnya bergeser ke bagaimana organisasi seharusnya berfungsi, bagaimana perilaku manusia di dalamnya, serta bagaimana pengambilan keputusan dilakukan. Administrasi publik mulai banyak dipengaruhi oleh teori manajemen modern, politik-ekonomi, serta proses pembuatan dan evaluasi kebijakan. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam paradigma ini termasuk Charles Lindblom, Gerald Caiden, Louis Gawthrop, dan Amitai Etzioni.

6. Governance (1990-sekarang)

Paradigma governance dapat dijelaskan sebagai proses pelaksanaan kekuasaan atau otoritas oleh para pemimpin politik untuk memastikan kesejahteraan warga negara atau subjek. Ini adalah proses yang rumit, di mana berbagai sektor masyarakat menggunakan kekuasaan untuk merumuskan, melaksanakan, dan menyebarkan kebijakan publik yang berdampak langsung pada individu dan institusi, serta berdampak pada interaksi sosial dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, governance tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga sektor

swasta dan masyarakat, yang bersama-sama berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.3.3.2. Konsepsi Paradigma George Frederickson (Ekowanti, 2022)

George Frederickson merumuskan lima model paradigma administrasi publik yang dijelaskan dari perspektif teori, yaitu pengetahuan yang didukung oleh data empiris. Lima model tersebut adalah: (1) Birokrasi Klasik, (2) Birokrasi Neo-Klasik, (3) Kelembagaan, (4) Hubungan Antar Manusia, dan (5) Pilihan Publik. Sebagai tambahan, Frederickson juga menyertakan model paradigma "Administrasi Negara Baru", yang memiliki dimensi serta implikasi nilai yang ingin diwujudkan melalui model ini.

1. **Birokrasi Klasik** berfokus pada desain organisasi dan prinsip-prinsip manajemen, dengan locus pada berbagai jenis organisasi, baik pemerintah maupun bisnis. Nilai yang ingin dicapai dalam paradigma ini mencakup efisiensi, efektivitas, ekonomi, dan rasionalitas. Tokoh- tokoh yang termasuk dalam paradigma ini adalah Frederick Taylor, Max Weber, Woodrow Wilson, serta L. Gulick dan L. Urwick.
2. **Birokrasi Neo-Klasik** memiliki nilai-nilai yang mirip dengan paradigma Birokrasi Klasik, namun dengan fokus dan locus yang berbeda. Fokusnya terletak pada proses pengambilan keputusan dalam birokrasi pemerintahan, dengan perhatian khusus pada penerapan ilmu perilaku, manajemen, analisis sistem, dan penelitian operasi. Locus dari paradigma ini adalah pada keputusan

yang dihasilkan, dengan tokoh-tokoh seperti Herbert Simon, William Gore, Richard Cuert, dan James March.

3. **Model Kelembagaan** berfokus pada pemahaman tentang perilaku birokrasi sebagai organisasi yang kompleks, di mana efisiensi, efektivitas, dan produktivitas organisasi kurang menjadi perhatian utama. Salah satu ciri yang ditekankan dalam paradigma ini adalah pengambilan keputusan yang bertahap dan inkremental, yang dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menyelaraskan kemampuan birokrasi dengan preferensi kebijakan dan bias politik. Tokoh-tokohnya antara lain Charles Lindblom, J. Thomson, Michel Crozier, Anthony Downs, Frederick Mosher, dan Amitai Etzioni.
4. **Model Hubungan Antar Manusia** menyoroti aspek sosial-psikologis dalam setiap bentuk organisasi dan birokrasi, dengan nilai-nilai utama seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan, pengurangan perbedaan status, keterbukaan, aktualisasi diri, dan kepuasan. Paradigma ini juga mencakup pendekatan pembelajaran (*learning paradigm*) yang berorientasi pada peningkatan kapasitas individu dan institusi. Tokoh-tokohnya antara lain Rensis Likert, Daniel Katz, Robert Kahn, Warren Bennis, dan Eugene McGregor.
5. **Model Pilihan Publik** menyatakan bahwa administrasi publik selalu terkait dengan politik, dengan locus pada pilihan-pilihan publik dalam penyediaan barang dan jasa oleh berbagai organisasi. Frederickson menggambarkan pendekatan ini sebagai "ekonomi politik modern" yang berdiri di antara ekonomi pasar bebas dan pilihan publik. Tokoh-tokoh yang dikaitkan dengan

paradigma ini termasuk Vincent Ostrom, James Buchanan, Michel Olson, dan George Tullock.

Berdasarkan enam paradigma yang telah dijelaskan, paradigma yang sesuai dengan penelitian ini adalah paradigma ke-6 yaitu Governance (1990–sekarang). Alasan utamanya adalah karena penelitian ini menyoroti proses kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai aktor terkait lainnya dalam mitigasi permasalahan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas. Pemerintah tidak diposisikan sebagai satu-satunya aktor yang bertanggung jawab, melainkan berperan sebagai fasilitator dan koordinator yang mendorong partisipasi aktif masyarakat serta keterlibatan lembaga teknis dan sektor pendukung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini mencerminkan karakteristik utama paradigma governance yang menekankan pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik secara bersama-sama, berbasis dialog, kepercayaan, dan komitmen antaraktor, sehingga tata kelola penanggulangan banjir rob menjadi lebih partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Administrasi publik pada dasarnya mencakup dua unsur utama, yaitu manajemen publik dan kebijakan publik, yang saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Manajemen publik berfokus pada cara organisasi pemerintahan diatur dan dijalankan agar mampu bekerja secara efektif dan efisien. Fokusnya terletak pada proses internal seperti pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, struktur organisasi, serta pelayanan publik, dengan tetap menjunjung prinsip akuntabilitas, keadilan, dan kepentingan umum. Sementara itu, kebijakan

publik berkaitan dengan proses pengambilan keputusan pemerintah dalam menangani berbagai persoalan masyarakat. Proses ini mencakup perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan, serta melibatkan berbagai aktor seperti pejabat publik, politisi, dan masyarakat. Dengan demikian, administrasi publik tidak hanya bersifat teknis dan manajerial, tetapi juga sarat dengan nilai, kepentingan, dan dinamika sosial-politik.

1.3.4. Manajemen Publik

Manajemen publik, sering disebut juga sebagai manajemen pemerintahan, adalah upaya pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini, manajemen telah menjadi elemen penting dalam operasi organisasi, baik di sektor lainnya yang terlibat maupun publik, termasuk pemerintahan. Menurut Shafritz dan Russell (dalam Keban, 2008:93), manajemen publik dapat dimaknai sebagai suatu bentuk tanggung jawab individu dalam mengelola dan mengarahkan jalannya organisasi secara efektif, melalui optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia, baik berupa sumber daya manusia maupun teknologi, demi tercapainya tujuan institusional yang telah ditetapkan. Sementara itu, Overman (dalam Keban, 2004:85) menyatakan bahwa manajemen publik tidak dapat disamakan dengan *scientific management*, meskipun terdapat pengaruh kuat dari pendekatan tersebut. Manajemen publik juga tidak identik dengan analisis kebijakan (*policy analysis*) ataupun administrasi publik. Sebaliknya, manajemen publik merefleksikan dinamika yang terjadi antara tekanan-tekanan politis dan orientasi kebijakan publik. Dalam konteks akademik, manajemen publik dipandang sebagai kajian interdisipliner yang menelaah aspek-

aspek umum dari organisasi, serta mengintegrasikan fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, dengan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana fisik, informasi, serta unsur-unsur politik yang melekat dalam proses administrasi pemerintahan.

Manajemen publik, atau yang juga dikenal sebagai manajemen pemerintahan, merupakan bentuk tanggung jawab dalam mengelola organisasi sektor publik secara efektif dan efisien. Dalam praktiknya, manajemen publik tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif semata, tetapi juga melibatkan perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program agar selaras dengan tujuan institusional yang telah ditetapkan. Dengan perkembangan kompleksitas masalah sosial dan lingkungan, manajemen publik kini dituntut untuk mampu beradaptasi dan bekerja lintas sektor serta aktor.

Dalam manajemen publik, *Collaborative Governance* memiliki hubungan yang sangat erat, terutama dalam konteks tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks dan tidak bisa lagi ditangani secara eksklusif oleh pemerintah saja. *Collaborative Governance* merupakan pendekatan yang menekankan kerja sama antara sektor publik, sektor lainnya yang terlibat, dan masyarakat sipil dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan atau program publik. Pendekatan ini sejalan dengan semangat manajemen publik modern yang mengutamakan partisipasi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor. Manajemen publik tradisional cenderung menempatkan birokrasi sebagai pusat kendali, namun dalam era sekarang, masalah publik seperti perubahan iklim, kemiskinan, atau pelayanan

kesehatan sering kali melibatkan banyak aktor dengan kepentingan dan sumber daya yang berbeda.

Collaborative Governance masuk sebagai kerangka yang memungkinkan berbagai aktor duduk bersama, berbagi tanggung jawab, menyamakan tujuan, dan menciptakan solusi bersama secara partisipatif. Dalam praktik manajemen publik, *Collaborative Governance* memperkuat peran manajer publik bukan hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai fasilitator, penghubung, dan jembatan antar aktor. Mereka harus mampu membangun kepercayaan, menciptakan forum dialog, mengelola konflik, dan menjaga proses kolaboratif tetap produktif. Hal ini mengubah pola kepemimpinan dalam birokrasi dari top-down menjadi lebih horizontal dan inklusif.

1.3.5. Teori *Collaborative*

1.3.5.1. *Collaborative Governance*

Konsep *Collaborative Governance* merujuk pada suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif berbagai aktor di luar lingkup pemerintah, seperti organisasi masyarakat sipil, sektor lainnya yang terlibat, maupun kelompok kepentingan lainnya. Pendekatan ini menekankan pada prinsip musyawarah dan pencapaian konsensus dalam proses pengambilan keputusan bersama, yang bertujuan untuk merumuskan maupun mengimplementasikan kebijakan serta program publik (Ansell & Gash, 2008). Kolaborasi sendiri dapat dipahami sebagai suatu aktivitas yang berakar pada pengelolaan jaringan sosial, yaitu struktur hubungan antar aktor yang saling terhubung melalui komunikasi dan interaksi. Berdasarkan pandangan tersebut, teori

kolaborasi dapat diartikan sebagai analisis terhadap proses tata kelola yang difokuskan pada dinamika jaringan sosial di antara para pemangku kepentingan.

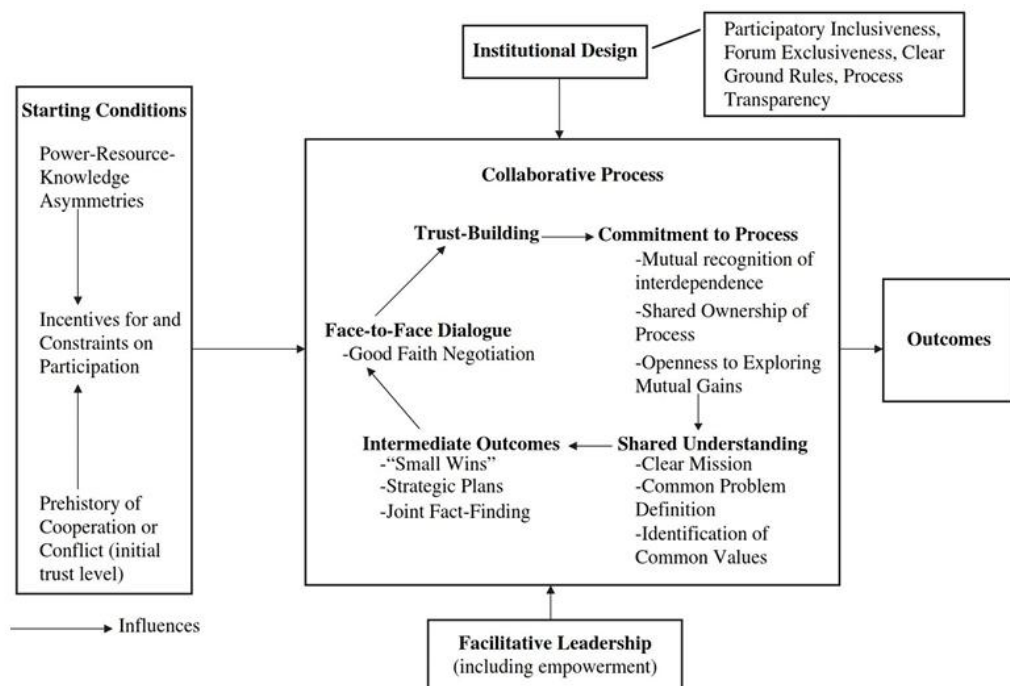
Model tata kelola kolaboratif menuntut keterlibatan langsung seluruh pihak yang berkepentingan dalam forum dialog, di mana masing-masing aktor memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasi serta kepentingan mereka secara langsung (Booher & Innes, 2002). Menurut O'Leary dan Bingham (dalam Sudarmo, 2015), kolaborasi merupakan sebuah konsep yang menggambarkan proses fasilitasi dan implementasi yang melibatkan berbagai organisasi dalam upaya menyelesaikan masalah yang tidak dapat atau sulit diselesaikan oleh satu organisasi saja. Pandangan ini diperkuat oleh Bardach (dalam Sudarmo, 2015), yang mendefinisikan kolaborasi sebagai bentuk kegiatan bersama antara dua atau lebih institusi yang berkoordinasi untuk meningkatkan public value, dibandingkan dengan bekerja secara terpisah.

Berdasarkan pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* merupakan suatu pendekatan tata kelola yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, sektor privat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh satu aktor saja. Hal ini mencerminkan bahwa fungsi pemerintahan tidak dijalankan secara eksklusif oleh institusi negara, melainkan melalui sinergi dengan aktor non-pemerintah seperti organisasi bisnis dalam rangka mewujudkan kepentingan publik.

1.3.5.2. Proses *Collaborative Governance*

Proses kolaboratif merupakan suatu mekanisme yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif serta kontribusi dari para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Dalam konteks *Collaborative Governance*, Ansell dan Gash (2008) mengemukakan bahwa terdapat sejumlah indikator penting yang menjadi tolok ukur efektivitas proses tersebut, antara lain interaksi melalui dialog langsung (*face-to-face dialogue*), pembangunan kepercayaan antar pihak, komitmen terhadap jalannya proses kolaboratif, pembentukan pemahaman yang bersifat kolektif, serta pencapaian hasil sementara yang dapat dijadikan dasar evaluasi berkelanjutan.

Gambar 1. 4 Model *Collaborative Governance*



Sumber: Ansell and Gash (dikutip Retno sunu, 2020)

Proses kolaborasi diawali dengan adanya interaksi langsung antar pemangku kepentingan yang berperan penting dalam membangun kepercayaan satu sama lain. Melalui interaksi tersebut, tingkat komitmen dalam kolaborasi cenderung meningkat secara bertahap. Komitmen yang kuat menjadi landasan bagi terbentuknya pemahaman bersama, baik dalam merumuskan permasalahan yang dihadapi, mengenali nilai-nilai yang dianut, maupun dalam menetapkan tujuan kolaborasi secara jelas dan terarah.

Kesamaan persepsi dan kesepahaman tersebut selanjutnya memungkinkan para pemangku kepentingan untuk menyusun strategi yang tepat dalam menjalankan kolaborasi secara efektif. Pelaksanaan kolaborasi tidak berlangsung secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan tertentu. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa proses kolaborasi terdiri atas tahapan-tahapan yang saling berkaitan dan menentukan keberhasilan kolaborasi itu sendiri.

1. Dialog tatap muka

Setiap bentuk *Collaborative Governance* terbentuk melalui proses dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dialog tersebut berperan sebagai tahap awal dalam membangun kesepahaman dan mencapai konsensus dalam konteks kerja sama. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peluang kolaborasi dengan menekankan pada potensi manfaat bersama yang dapat diperoleh oleh semua pihak yang terlibat apabila kerja sama tersebut diwujudkan.

2. Membangun kepercayaan

Dalam konteks pembangunan kepercayaan, dialog atau komunikasi antarpemangku kepentingan merupakan elemen yang tidak terpisahkan. Interaksi

komunikatif yang terjalin secara konsisten berperan penting dalam membentuk dan memperkuat kepercayaan, sehingga hubungan antar pihak dapat berlangsung secara optimal. Proses ini menuntut adanya komitmen yang kuat dari setiap pihak yang terlibat serta memerlukan waktu yang tidak singkat, mengingat pembangunan kepercayaan merupakan suatu proses jangka panjang yang bersifat gradual dan berkelanjutan.

3. Komitmen pada proses kolaborasi

Para pemangku kepentingan berada dalam situasi yang saling bergantung dan memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi, yang pada gilirannya mendorong terbentuknya komitmen kuat untuk menjalin kolaborasi. Kolaborasi tersebut tidak bersifat sementara atau dilakukan sekali saja, melainkan merupakan upaya berkelanjutan yang mencerminkan kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan bagi seluruh pihak yang terlibat.

4. Pemahaman bersama

Pada tahap ini, para aktor yang terlibat diharuskan untuk melakukan pertukaran informasi secara terbuka terkait dengan capaian yang dapat diraih secara kolektif. Tahapan ini mencakup perumusan tujuan kolaboratif yang terdefinisi dengan jelas, identifikasi permasalahan yang akan diselesaikan secara bersama, serta penyamaan persepsi mengenai nilai-nilai yang hendak dicapai melalui proses kerjasama tersebut.

5. Hasil sementara

Kolaborasi cenderung memiliki keberlanjutan apabila menghasilkan manfaat yang nyata dan dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat, meskipun hasil

tersebut masih tergolong minimal. Dampak positif yang meskipun kecil ini berperan penting sebagai stimulus dalam memperkuat rasa saling percaya serta membangun komitmen bersama di antara para aktor kolaboratif.

1.3.5.3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat *Collaborative Governance*

Penyelesaian permasalahan dalam implementasi konsep *Collaborative Governance* dapat dilakukan melalui identifikasi terhadap sejumlah aspek krusial yang berperan penting dalam upaya perbaikan. Aspek-aspek tersebut mencakup faktor-faktor yang berfungsi sebagai pendukung maupun penghambat, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai parameter dalam menilai tingkat efektivitas kolaborasi yang terjalin. Mengacu pada Menurut *Government of Canada* (2008), pendukung dan penghambatan dalam proses *Collaborative Governance* dapat disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu: (1) faktor budaya; (2) faktor kelembagaan; dan (3) faktor politik. Ketiga faktor ini merupakan elemen penting yang memengaruhi efektivitas kerja sama antar pihak, sebagaimana dijelaskan dalam uraian berikut :

1. Faktor Budaya

Kegagalan dalam kolaborasi dapat disebabkan oleh adanya kecenderungan budaya birokratis yang terlalu bergantung pada prosedur serta minimnya keberanian untuk melakukan inovasi dan mengambil risiko. Terbentuknya kolaborasi yang efektif menuntut aparatur pemerintah dan para pemimpinnya untuk memiliki kemampuan serta kemauan untuk terlibat dalam kemitraan yang bersifat pragmatis dan berorientasi pada hasil. Meskipun secara teoritis dimungkinkan untuk mengabaikan konvensi demi mendukung kolaborasi, hal ini sulit diwujudkan

dalam lingkungan pelayanan publik yang sangat prosedural dan cenderung menghindari risiko. Ketergantungan berlebih terhadap aturan formal justru menjadi hambatan yang menghambat perkembangan dan peningkatan kualitas kolaborasi itu sendiri.

Selain itu, kegagalan kolaborasi juga kerap terjadi akibat masih kuatnya pendekatan *top-down* yang dipertahankan oleh pemerintah dalam berinteraksi dengan pihak lain. Dominasi pemerintah serta ketidakmampuan untuk menjalankan kesepakatan berdasarkan prinsip kesetaraan dan semangat kerja sama turut menjadi faktor penghambat dalam mewujudkan kolaborasi yang ideal. Lebih lanjut, minimnya partisipasi dari kelompok kepentingan atau pemangku kepentingan lainnya juga menjadi masalah yang krusial, mengingat partisipasi mereka sering kali tidak dianggap penting atau bahkan diabaikan, terutama ketika pemerintah mendominasi proses melalui pendekatan *top-down*. Di sisi lain, kolaborasi juga dapat gagal apabila strategi kooptasi dilakukan secara manipulatif, yakni dengan hanya mengakomodasi kelompok-kelompok yang pro terhadap kebijakan pemerintah, sementara kelompok yang bersikap kritis atau menentang justru disingkirkan. Praktik semacam ini tidak hanya mengabaikan prinsip inklusivitas dalam kolaborasi, tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan kekuasaan yang merusak semangat kemitraan sejati.

2. Faktor Kelembagaan

Kolaborasi antarlembaga sering kali terbentuk karena adanya kecenderungan institusi, khususnya institusi pemerintah, untuk mempertahankan struktur organisasi yang bersifat hierarkis dalam menjalin kerja sama. Pola

organisasi yang masih dominan vertikal ini menyebabkan arah kebijakan dan mekanisme akuntabilitas juga bersifat *top-down*, yang kurang selaras dengan prinsip dasar kolaborasi. Padahal, kolaborasi menuntut pola pengorganisasian yang horizontal, setara, dan partisipatif antara aktor pemerintah maupun non-pemerintah. Bahkan, dalam sistem pemerintahan demokratis yang menerapkan model demokrasi representatif sekalipun, belum tentu mendukung proses kolaboratif. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat formalisasi dan kompleksitas prosedural dalam sistem demokrasi tersebut, yang cenderung bertentangan dengan sifat kolaborasi yang lebih fleksibel dan spontan. Kolaborasi tidak selalu membutuhkan regulasi formal yang ketat atau prosedur standar seperti yang lazim digunakan dalam organisasi publik yang birokratis dan mekanistik.

Selain itu, bentuk akuntabilitas dalam institusi publik umumnya bersifat kaku, terbatas pada kepatuhan terhadap atasan, struktur organisasi, atau peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, akuntabilitas lebih difokuskan pada tanggung jawab administratif (responsibilitas) ketimbang pada akuntabilitas substantif yang berorientasi pada hasil dan kebutuhan publik secara luas. Maka dari itu, pola institusional yang demikian menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan.

3. Faktor Politik

Kegagalan dalam pelaksanaan kolaborasi sering kali disebabkan oleh rendahnya kapasitas inovatif dari para pemimpin dalam merespons tujuan-tujuan politik yang kompleks dan kontradiktif. Kepemimpinan yang inovatif dan visioner berperan penting dalam memperkenalkan nilai-nilai serta tujuan strategis yang

dapat menjadi landasan utama dalam tata kelola kolaboratif, sekaligus memberikan inspirasi dalam penyusunan agenda bersama dan mendorong tercapainya hasil-hasil yang positif. Hambatan dalam kolaborasi dapat muncul apabila para pemimpin dari kelompok yang terlibat tidak menunjukkan inovasi dalam menghadapi dinamika politik yang kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik antar kepentingan.

Selain itu, kolaborasi juga sering kali menghadapi tantangan dalam bentuk konflik tujuan antar kelompok yang terlibat. Konflik ini umumnya tercermin dari perbedaan tujuan masing-masing pihak, meskipun kepentingan tersebut sebenarnya masih dapat dikelola dan diminimalisasi melalui proses kolaboratif. Faktor lain yang turut menyebabkan kegagalan kolaborasi adalah adanya perubahan terhadap kesepakatan awal serta munculnya kepentingan baru di antara para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya para pemimpin kelompok. Perubahan ini dapat mengganggu stabilitas dan keberlanjutan kerja sama yang telah dibangun sebelumnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008) sangat relevan dalam konteks penelitian ini karena mampu menjelaskan bagaimana kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya yang terlibat diperlukan untuk menangani permasalahan kompleks seperti banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas. Teori ini menekankan pentingnya proses partisipatif, dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, serta komitmen bersama dalam mencapai tujuan kolektif. Dalam implementasinya, kolaborasi mulai terbangun melalui peran aktif BPBD sebagai pemimpin yang mengkoordinasikan berbagai instansi dan sektor

lainnya yang terlibat, dengan dukungan regulasi seperti UU No. 24 Tahun 2007 dan Perda Kota Semarang.

Dalam konteks *Collaborative Governance*, keberhasilan suatu kolaborasi sangat ditentukan oleh beberapa faktor penting yang bisa menjadi pendukung maupun penghambat. Penyelesaian permasalahan dalam implementasi *Collaborative Governance* memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui identifikasi terhadap berbagai aspek krusial yang memengaruhi efektivitasnya. Mengacu pada *Government of Canada* (2008), terdapat tiga faktor utama yang dapat menjadi pendukung sekaligus penghambat dalam praktik *Collaborative Governance*, yaitu faktor budaya, kelembagaan, dan politik. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan kolaborasi antar aktor, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah. Faktor budaya, keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada keberanian aktor birokrasi untuk keluar dari pola kerja prosedural yang kaku serta mengedepankan pendekatan partisipatif dan inovatif. Kegagalan kolaborasi sering terjadi karena masih kuatnya budaya birokratis, pendekatan *top-down*, rendahnya partisipasi kelompok kepentingan, serta praktik kooptasi yang diskriminatif terhadap kelompok kritis. Faktor kelembagaan menunjukkan bahwa struktur organisasi pemerintah yang masih hierarkis dan prosedural sering kali tidak selaras dengan prinsip-prinsip kolaborasi yang menuntut kesetaraan, fleksibilitas, dan partisipasi. Ketidaksesuaian ini menyebabkan hambatan dalam pengambilan keputusan bersama serta lemahnya akuntabilitas substantif yang seharusnya berorientasi pada kebutuhan publik, bukan semata-mata kepatuhan administratif. Faktor politik berfokus pada peran

kepemimpinan dalam mengelola dinamika tujuan-tujuan politik yang kompleks. Kepemimpinan yang tidak inovatif dan visioner akan menyulitkan proses kolaboratif, terutama ketika menghadapi konflik kepentingan atau perubahan agenda yang tidak disepakati bersama. Stabilitas kerja sama juga rentan terganggu oleh munculnya kepentingan baru dan perubahan terhadap kesepakatan awal.

1.3.6. Mitigasi Bencana

Bencana merupakan suatu kejadian yang berlangsung secara tiba-tiba dan sering kali melampaui kemampuan manusia untuk memprediksinya secara akurat. Meskipun waktu kejadiannya tidak dapat dipastikan, manusia tetap dapat mengenali gejala-gejala awal yang menandakan potensi terjadinya bencana. Pentingnya langkah-langkah untuk menekan risiko serta mengurangi dampak bencana menjadi semakin jelas dalam konteks ini. Salah satu pendekatan strategis yang dapat dilakukan adalah mitigasi bencana, yakni serangkaian tindakan sistematis yang ditujukan untuk mengantisipasi, mereduksi, dan mengelola dampak bencana guna menekan potensi kerugian yang muncul (Bakornas, 2007). Mitigasi bencana mencakup berbagai upaya yang dirancang secara komprehensif agar masyarakat lebih siap dalam menghadapi kemungkinan bencana. Keberhasilan mitigasi sangat bergantung pada ketepatan dan efektivitas langkah-langkah yang diterapkan, sehingga mampu memberikan perlindungan yang optimal kepada kelompok terdampak (Aminuddin, 2013).

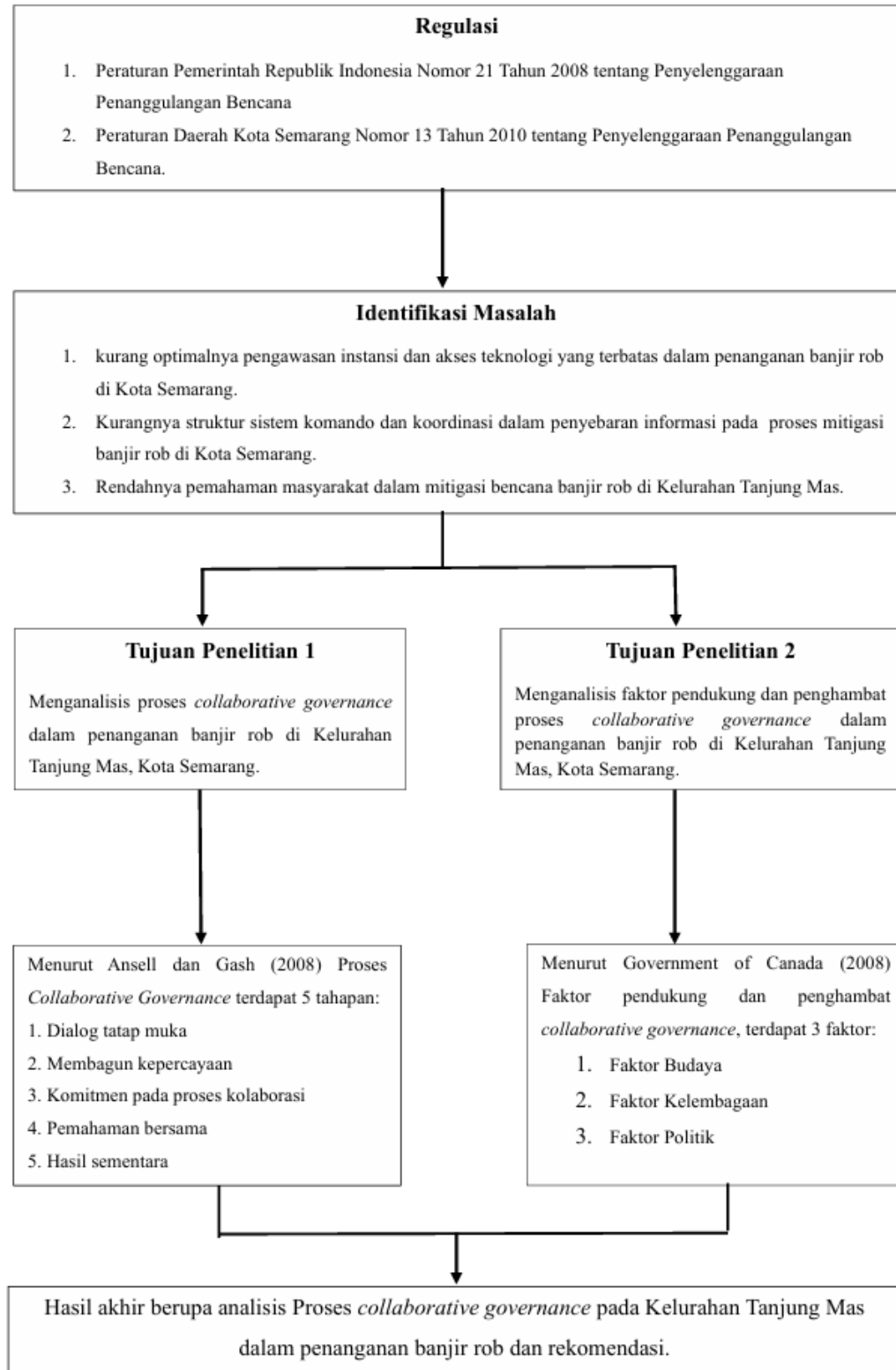
Tujuan utama mitigasi adalah memastikan respons bencana berlangsung cepat dan sesuai kebutuhan lapangan, melalui perencanaan berkelanjutan serta penyediaan sumber daya seperti alat darurat, tenaga medis, logistik, dan sarana

evakuasi. Namun, yang lebih penting adalah efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya tersebut saat kondisi darurat terjadi. Pemahaman mengenai mekanisme penggunaan sumber daya secara tepat dalam situasi krisis menjadi salah satu komponen penting dalam memperkuat sistem mitigasi bencana (Dodon, 2013). Dalam upaya mengurangi risiko bencana alam, pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis yang tertuang dalam kerangka regulasi nasional. Salah satu regulasi utama yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Regulasi ini menandai adanya perubahan paradigma dalam manajemen bencana di Indonesia, dari yang semula bersifat reaktif atau berfokus pada respons tanggap darurat, menjadi pendekatan yang lebih proaktif dan preventif melalui strategi mitigasi risiko.

Pendekatan ini dipertegas lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang mendefinisikan mitigasi sebagai serangkaian upaya sistematis untuk mengurangi potensi dampak bencana, baik melalui pembangunan infrastruktur fisik maupun peningkatan kapasitas serta kesadaran masyarakat terhadap risiko yang dihadapi. Secara konseptual, mitigasi bencana terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi non-struktural mencakup upaya pemberdayaan masyarakat serta penyelenggaraan edukasi kebencanaan yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang memiliki kesiapsiagaan dan pengetahuan memadai dalam menghadapi potensi bencana.

Mitigasi bencana merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam menghadapi risiko bencana, terutama di wilayah rawan seperti Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang yang kerap terdampak banjir rob. Perubahan paradigma dari pendekatan reaktif menuju pendekatan preventif yang berbasis mitigasi telah diatur dalam regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2008. Keberhasilan mitigasi sangat bergantung pada efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan, yang dapat diwujudkan melalui pendekatan *Collaborative Governance*. Pendekatan ini memungkinkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor lainnya yang terlibat, dan akademisi dalam mengelola risiko bencana secara partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.

1.4. Kerangka Pikir



Menurut Sugiyono (2013), kerangka berpikir adalah alur berpikir atau pola yang dijadikan landasan dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Selain itu, Polancik (2009) mendefinisikan kerangka berpikir sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematika tema yang akan ditulis, yang membantu peneliti dalam menyusun argumen yang sistematis dan terstruktur. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada pendekatan *Collaborative Governance* yang diperkenalkan oleh Chris Ansell dan Alison Gash pada tahun 2008. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks tata kelola publik modern, khususnya dalam penanganan permasalahan kompleks seperti bencana banjir rob yang terjadi secara berulang di wilayah pesisir seperti Kelurahan Tanjung Mas. *Collaborative Governance* merupakan bentuk tata kelola yang menempatkan kolaborasi sebagai inti dari proses pengambilan keputusan publik. Pendekatan ini melibatkan aktor-aktor lintas sektor, baik dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor lainnya yang terlibat, maupun organisasi non-pemerintah, yang bekerja bersama secara deliberatif dalam forum yang setara dan inklusif untuk merumuskan solusi terhadap persoalan bersama.

Konsep ini lahir sebagai respons terhadap keterbatasan model tata kelola yang bersifat hierarkis dan top-down, di mana pemerintah menjadi satu-satunya pengambil keputusan. Dalam *Collaborative Governance*, peran pemerintah tidak lagi dominan secara mutlak, melainkan lebih difungsikan sebagai fasilitator, penghubung, dan penyedia ruang diskusi yang memungkinkan semua pihak terlibat secara aktif dan setara. Hal ini penting terutama dalam konteks penanggulangan bencana, di mana keberhasilan upaya mitigasi sangat dipengaruhi oleh koordinasi,

partisipasi masyarakat, dan dukungan dari sektor lain di luar pemerintah. Dalam kerangka teori *Collaborative Governance*, terdapat empat komponen kunci yang menjadi dasar analisis. Komponen pertama adalah kondisi awal yang menjadi landasan dimulainya proses kolaborasi. Kondisi ini mencakup ketimpangan kekuasaan di antara para aktor, sejarah konflik atau kerja sama sebelumnya, serta tingkat kepercayaan awal antar pihak. Jika ketimpangan terlalu besar atau kepercayaan sangat rendah, maka kolaborasi yang efektif sulit terwujud. Komponen kedua adalah desain kelembagaan, yaitu struktur formal yang mengatur tata cara kolaborasi, termasuk prosedur partisipatif, kejelasan peran, mekanisme pengambilan keputusan bersama, dan prinsip transparansi. Desain kelembagaan yang baik memungkinkan partisipasi dari berbagai aktor secara adil dan memperkuat akuntabilitas proses.

Komponen ketiga adalah kepemimpinan fasilitatif, yang berperan sebagai motor penggerak dalam mengelola dinamika antar aktor. Kepemimpinan ini tidak bersifat otoriter, melainkan bersifat mendukung, membangun kepercayaan, menengahi konflik, serta mengarahkan proses menuju tujuan bersama. Peran pemimpin yang mampu memfasilitasi kolaborasi menjadi sangat penting, terlebih dalam konteks bencana yang seringkali penuh dengan tekanan dan kepentingan yang berbeda-beda. Komponen keempat adalah proses kolaboratif itu sendiri, yang mencakup berbagai tahapan penting seperti dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan timbal balik, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama atas tujuan, serta pencapaian hasil yang disepakati bersama. Kolaborasi bukanlah proses

yang linier, melainkan siklik dan dinamis, karena selalu terjadi adaptasi dan evaluasi dari waktu ke waktu.

Selain empat komponen utama tersebut, kerangka teori *Collaborative Governance* dalam penelitian ini juga memperhatikan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dapat memengaruhi keberhasilan kolaborasi. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan ke dalam tiga aspek penting. Pertama adalah faktor sosial, yang merujuk pada kapasitas sosial masyarakat dan aktor lainnya dalam membangun kepercayaan, menjalin komunikasi, serta memperkuat jaringan kerja sama. Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh, kapasitas sosial menjadi fondasi penting dalam menjamin keberhasilan kolaborasi karena mempengaruhi sejauh mana aktor dapat bekerja bersama dengan efektif. Kedua adalah faktor kultural, yang mencakup perbedaan nilai, norma, dan budaya organisasi antar aktor. Ansell dan Gash menegaskan bahwa perbedaan ini dapat menjadi sumber hambatan apabila tidak dikelola dengan baik karena dapat menimbulkan resistensi dalam proses pengambilan keputusan bersama. Ketiga adalah faktor kepentingan institusional, terutama dominasi pemerintah. Huxham dan Vangen mengkritisi bahwa sering kali pemerintah mengambil peran yang terlalu besar dalam kolaborasi, sehingga melemahkan kontribusi aktor non-pemerintah dan menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang merusak prinsip inklusivitas.

Dalam konteks penelitian ini, kerangka teori *Collaborative Governance* dipilih karena mampu menjelaskan secara komprehensif dinamika hubungan antar aktor dalam penanggulangan banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas. Kolaborasi yang dibangun melibatkan pemerintah daerah melalui BPBD, masyarakat setempat,

serta sektor lainnya yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses kolaborasi tersebut berlangsung, bagaimana struktur kelembagaan dan kepemimpinan dijalankan, serta sejauh mana kepercayaan dan partisipasi terbentuk di antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan menggunakan kerangka teori ini, peneliti berusaha untuk mengevaluasi tidak hanya keberhasilan teknis dalam mitigasi banjir rob, tetapi juga efektivitas proses tata kelola yang melandasinya. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk melihat lebih dalam faktor-faktor apa saja yang menjadi penguat dan penghalang dalam membangun kolaborasi yang ideal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan konsep *Collaborative Governance* dalam konteks mitigasi bencana, serta memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan dalam mengelola risiko bencana secara lebih adaptif dan berkelanjutan.

1.5. Operasionalisasi Konsep

1.5.1. *Collaborative Governance*

Collaborative Governance dalam mitigasi bencana banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang merupakan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya yang terlibat yang dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam lingkup publik dengan mencapai tujuan bersama.

Konsep ini dijelaskan melalui lima elemen kunci yang menjadi indikator operasional dalam proses kolaborasi, yaitu:

1. Dialog Tatap Muka

Interaksi langsung antar aktor yang memungkinkan pertukaran informasi, penguatan komunikasi, serta pembentukan dasar pemahaman dan kepercayaan.

- 1) Forum diskusi rutin antara pemerintah, warga, dan sektor lainnya yang terlibat
- 2) Pertemuan koordinasi lintas sektor dalam merancang strategi mitigasi

2. Membangun Kepercayaan

Proses saling percaya antar pihak yang terbentuk dari konsistensi tindakan, keterbukaan informasi, dan pengalaman kerja sama sebelumnya.

- 1) Adanya transparansi dalam pembagian peran dan sumber daya
- 2) Riwayat kerja sama yang minim konflik

3. Komitmen terhadap Proses Kolaborasi

Kesiapan dan kesediaan aktor untuk terlibat secara berkelanjutan dalam seluruh tahapan kolaborasi.

- 1) Partisipasi aktif dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan
- 2) Keterlibatan dalam pelaksanaan program mitigasi

4. Pemahaman Bersama

Kesepahaman mengenai permasalahan yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai bersama.

- 1) Persepsi yang sama tentang ancaman banjir rob
- 2) Tujuan kolaboratif yang disepakati oleh semua pihak

5. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Capaian awal dari proses kolaborasi yang memperkuat motivasi dan legitimasi kerja sama lebih lanjut.

- 1) Terbentuknya sistem peringatan dini
- 2) Infrastruktur awal seperti tanggul atau sistem drainase kolaboratif

1.5.2. Faktor Pendukung dan Penghambat *Collaborative Governance*

Dalam keberjalannya *Collaborative Governance* menuju keberhasilan dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Pendukung merupakan segala kondisi yang dapat membantu kelancaran suatu upaya, sementara penghambat merupakan kondisi yang berpotensi merintangi atau melemahkan upaya yang sedang dilakukan. Dalam persoalan mitigasi banjir rob di Tanjung Mas, terdapat beberapa hambatan *Collaborative Governance* sebagai berikut:

1. Faktor Budaya

Faktor ini berkaitan dengan nilai, norma, dan budaya kerja dari berbagai aktor yang terlibat (pemerintah, masyarakat, sektor lainnya yang terlibat, NGO, dll). Kesamaan budaya mendorong kolaborasi, sementara perbedaan dapat menghambatnya.

- 1) Kesamaan persepsi nilai antar lembaga dan masyarakat
- 2) Adanya budaya gotong royong dalam penanganan banjir
- 3) Perbedaan interpretasi terhadap peran masing-masing aktor

2. Faktor Kelembagaan

Faktor ini menyangkut aturan formal, struktur organisasi, dan kapasitas lembaga yang mempengaruhi jalannya kolaborasi.

- 1) Kejelasan tugas dan tanggung jawab antar lembaga
- 2) Adanya kerangka regulasi yang mendukung kolaborasi
- 3) Tumpang tindih kewenangan antar lembaga
- 4) Kurangnya kapasitas kelembagaan dalam implementasi program

3. Faktor Politik

Faktor ini menyangkut dukungan atau hambatan yang bersifat politis, baik dari elite lokal, pemerintah, atau kekuatan politik lain yang mempengaruhi jalannya kolaborasi.

- 1) Dukungan politik dari pemerintah daerah terhadap program kolaboratif
- 2) Stabilitas politik lokal yang memungkinkan keberlangsungan program
- 3) Adanya konflik kepentingan antar aktor politik
- 4) Pengaruh elite lokal dalam proses pengambilan keputusan

1.6 Argumen Penelitian

Banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, merupakan bentuk bencana hidrometeorologi yang telah berlangsung secara kronis dan mengakibatkan dampak multidimensional, mulai dari kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, penurunan kualitas hidup, hingga disrupsi terhadap mobilitas dan kegiatan sosial masyarakat. Tingginya kerentanan wilayah ini disebabkan oleh kombinasi faktor lingkungan dan sosial seperti penurunan muka tanah, pasang air laut, eksploitasi air tanah yang berlebihan, hingga kurangnya infrastruktur penanggulangan bencana yang memadai. Dalam konteks ini, upaya mitigasi bencana menjadi suatu keharusan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi dipahami sebagai rangkaian upaya

yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, yang menjabarkan mitigasi sebagai langkah preventif yang dilakukan sebelum bencana terjadi dan merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional.

Selain itu, Pemerintah Kota Semarang melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 juga telah menetapkan bahwa penanggulangan bencana, termasuk banjir rob, harus dilakukan secara menyeluruh dalam tiga tahap: pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana. Namun, pelaksanaan mitigasi banjir rob di Semarang, khususnya di Tanjung Mas, masih menghadapi tantangan serius dalam hal koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam implementasinya di tingkat lokal. Dalam hal ini diperlukan pendekatan baru yang lebih integratif, kolaboratif, dan adaptif untuk menjawab kompleksitas permasalahan ini. Pendekatan yang relevan dan menjanjikan dalam konteks ini adalah *Collaborative Governance*. Teori *Collaborative Governance* seperti yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), menyarankan bahwa penyelesaian masalah publik yang kompleks dan lintas sektor tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah saja, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya yang terlibat dalam forum yang setara dan transparan. Proses ini mencakup pembangunan kepercayaan, dialog tatap muka, komitmen terhadap proses, dan pencapaian pemahaman serta tujuan bersama.

Dalam konteks banjir rob di Tanjung Mas, penerapan *Collaborative Governance* sangat relevan karena mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai pihak, mengoptimalkan peran dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor, serta mendorong penyusunan kebijakan yang lebih berbasis partisipasi dan kebutuhan lokal. Pemerintah dapat berperan sebagai fasilitator dan pembuat kebijakan, masyarakat sebagai pelaku utama yang terdampak sekaligus agen perubahan, sementara sektor lainnya yang terlibat dapat memberikan dukungan dari sisi teknologi, pendanaan, maupun manajemen risiko. Namun, penerapan *Collaborative Governance* ini juga tidak bebas hambatan.

Berdasarkan studi sebelumnya dan hasil observasi awal, tantangan utama dalam penerapan kolaborasi ini di Kota Semarang meliputi lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan kendaraan dan teknologi pendukung, rendahnya literasi kebencanaan di kalangan masyarakat, serta belum maksimalnya mekanisme pengambilan keputusan berbasis konsensus. Oleh karena itu, penelitian ini berargumen bahwa kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan *Collaborative Governance*, bila diimplementasikan secara sistematis dan berbasis pada regulasi yang sudah ada, akan menjadi jalan tengah yang mampu menjawab berbagai kekurangan yang melekat pada pendekatan sektoral selama ini. Penelitian ini hendak menggali sejauh mana proses, efektivitas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam praktik *Collaborative Governance* untuk mitigasi banjir rob di Tanjung Mas. Dengan memperkuat pendekatan kolaboratif ini, diharapkan upaya mitigasi tidak hanya menjadi

kewajiban pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama yang dikelola secara kolektif, berkelanjutan, dan berbasis nilai sosial.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh Rahardjo (2017), merupakan suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran yang bersifat sementara (tentatif), bukan bersifat mutlak atau absolut. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk mencapai pemahaman yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sementara itu, menurut Ali (2009), metode penelitian merupakan cabang ilmu yang membahas mengenai proses, prinsip, dan kaidah-kaidah dalam pelaksanaan penelitian, termasuk di dalamnya mencakup asumsi dasar, nilai-nilai, serta standar yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data secara teknis. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif bersifat eksploratif dan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji melalui proses analisis yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2020:9), pendekatan penelitian kualitatif merupakan metode yang diterapkan untuk mengkaji objek dalam konteks alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi atau penggabungan berbagai metode, sedangkan analisis data dilakukan secara induktif. Hasil dari penelitian kualitatif lebih mengutamakan pendalaman makna daripada penarikan generalisasi secara luas. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menerapkan desain studi literature

(*literature review*) sebagai metode utama. Studi literatur merupakan bentuk kajian yang menyajikan ringkasan, analisis, dan sintesis terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan dan telah dipublikasikan oleh para akademisi serta peneliti yang kredibel (Taylor, 2013). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi temuan-temuan utama, kesenjangan penelitian, serta kontribusi teoritis dan praktis dari studi-studi sebelumnya terkait topik yang diteliti.

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara menyeluruh dinamika kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya yang terlibat dalam upaya mitigasi banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang. Fokus utamanya adalah mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks, seperti interaksi antar aktor, motivasi, persepsi, serta proses pengambilan keputusan yang tidak dapat direpresentasikan secara kuantitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci pelaksanaan kolaborasi, tantangan yang dihadapi, dan faktor-faktor yang mendukung implementasi strategi mitigasi tersebut. Pemilihan metode ini dianggap relevan mengingat persoalan banjir rob di Tanjung Mas tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga mencakup dimensi sosial, kelembagaan, dan komunikasi lintas sektor. Melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, pendekatan ini mampu menghasilkan pemahaman kontekstual terhadap realitas di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan peran masing-masing aktor, tetapi juga bagaimana mereka

membangun kolaborasi yang efektif dalam kerangka *Collaborative Governance* untuk menghadapi tantangan banjir rob secara berkelanjutan.

1.7.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi atau tempat tertentu yang dipilih secara strategis untuk pelaksanaan kegiatan penelitian, dengan tujuan memperoleh data dan informasi yang relevan terhadap fokus kajian. Situs penelitian dalam kajian ini adalah Kelurahan Tanjung Mas, yang terletak di Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kawasan ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu wilayah yang paling sering dan paling parah terdampak oleh bencana banjir rob setiap tahunnya. Banjir rob di Tanjung Mas disebabkan oleh kombinasi dari beberapa faktor, yaitu pasang air laut, penurunan muka tanah, dan perubahan iklim. Selain itu, eksploitasi air tanah yang berlebihan juga menjadi salah satu penyebab utama land subsidence (penurunan permukaan tanah), sehingga membuat wilayah tersebut semakin rentan terhadap genangan air laut.

Kelurahan Tanjung Mas memiliki karakteristik topografi yang rendah dan landai, dengan kemiringan hanya sekitar 0–2%. Hal ini membuat wilayah tersebut berada lebih rendah dibandingkan permukaan air laut, sehingga ketika terjadi pasang laut atau jebolnya tanggul, air laut dengan mudah menggenangi pemukiman penduduk. Salah satu wilayah terdampak yang disoroti dalam dokumen adalah RW 16, termasuk Kampung Tambakrejo, yang mengalami genangan dengan ketinggian air mencapai 60–75 cm. Bahkan, pada tahun 2022, dilaporkan bahwa lebih dari 2.000 kepala keluarga terdampak akibat jebolnya tanggul dan meluasnya genangan

air hingga sekitar 300 hektar lahan. Pemilihan Kelurahan Tanjung Mas sebagai lokasi penelitian juga didasari oleh fakta bahwa wilayah ini merupakan fokus program penanganan banjir rob dari pemerintah daerah, khususnya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Pemerintah telah menetapkan kebijakan mitigasi bencana berbasis partisipasi masyarakat, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti kurangnya koordinasi, minimnya partisipasi masyarakat, hingga keterbatasan sumber daya dan teknologi.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan *Collaborative Governance* dilakukan di lapangan, khususnya di Kelurahan Tanjung Mas. Lokasi ini menjadi representatif untuk menggambarkan kondisi riil pelaksanaan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya yang terlibat dalam mengelola bencana. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang memungkinkan peneliti menggali secara mendalam proses, dinamika, hambatan, dan faktor pendukung kolaborasi yang terjadi di lapangan.

1.7.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian juga disebut dengan informan, yaitu orang yang dapat dipercaya untuk menjadi narasumber dalam memberikan informasi yang akurat untuk melengkapi data dalam penelitian (Moleong, 2017: 165-166). Teknik pengambilan informan dalam penelitian ini selain menggunakan *purposive sampling* juga menggunakan *snowball sampling*. *Snowball Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya berjumlah sedikit, lama

kelamaan akan menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka dari itu peneliti mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai metode penentuan informan. Sugiyono (2012:54) menjelaskan bahwa *purposive sampling* merupakan teknik pemilihan sampel sumber data yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut dapat berupa penilaian bahwa individu yang dipilih memiliki pengetahuan paling relevan dengan kebutuhan penelitian, atau memiliki posisi yang memudahkan peneliti dalam memahami kondisi sosial yang diteliti. Informan utama dipilih karena dianggap memiliki pemahaman yang mendalam dan keterkaitan langsung dengan isu yang sedang diteliti. Sementara itu, informan pendukung berfungsi sebagai pelengkap untuk memberikan tambahan informasi yang diperlukan. Penetapan informan dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti, yang disesuaikan dengan relevansi dan kontribusi mereka terhadap kebutuhan penelitian ini.

Informan yang ditentukan secara *purposive sampling* dalam penelitian ini adalah:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang
2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

3. Perangkat Kelurahan Tanjung Mas
4. Tokoh masyarakat RW terdampak banjir rob

1.7.4. Jenis dan Sumber Data

1.7.4.1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa hasil wawancara maupun hasil dokumentasi berupa foto, video keadaan di lapangan maupun hasil rekaman wawancara yang berasal dari informan saat melakukan penelitian di Tanjung Mas Kota Semarang.

1.7.4.2. Sumber Data

Menurut Siyoto & Sodik (2015, hlm. 67–68), data penelitian dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu:

1. **Data primer** diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aktor-aktor yang terlibat langsung dalam mitigasi banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas, seperti BPBD Kota Semarang, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan sektor lainnya yang terlibat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi secara mendalam.
2. **Data sekunder** dikumpulkan dari dokumen resmi seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah dan daerah, laporan BPBD, berita media massa, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema *Collaborative Governance* dan mitigasi bencana. Kombinasi kedua sumber data ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan akurat terhadap objek penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan data kualitatif sebagai jenis data utama, yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dalam bentuk foto, video, serta rekaman selama pengumpulan data di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam mitigasi banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas, seperti BPBD Kota Semarang, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan sektor lainnya yang terlibat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, laporan, berita, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Kombinasi kedua jenis sumber data ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan akurat terhadap permasalahan yang diteliti.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui teknik survei, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik ini dipilih dengan mempertimbangkan keterbatasan akses ke lapangan dan narasumber secara langsung, serta dengan mempertimbangkan bahwa permasalahan yang diteliti memiliki jejak dokumentatif yang cukup luas dalam bentuk kebijakan, laporan, dan hasil kajian akademik. Misalnya, dalam penelitian tentang *Collaborative Governance* dalam mitigasi permasalahan bencana banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang, survei dapat dilakukan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat mengenai efektivitas penanganan banjir rob, sementara wawancara dengan pejabat BPBD, perangkat kelurahan, dan pemangku

kepentingan lainnya dapat memberikan wawasan mendalam terkait praktik kolaboratif dalam mitigasi bencana. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik utama dalam menggali informasi langsung dari informan kunci. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan keleluasaan kepada informan dalam menyampaikan pandangan, pengalaman, dan pengetahuan mereka terkait proses kolaborasi dalam mitigasi banjir rob. Informan yang dipilih berasal dari berbagai latar belakang, seperti pihak pemerintah (BPBD dan kelurahan), tokoh masyarakat, serta sektor lainnya yang terlibat yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Tujuan utama dari wawancara dalam penelitian ini adalah untuk menggali informasi secara mendalam dan langsung dari para informan kunci yang terlibat dalam proses mitigasi banjir rob, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan *Collaborative Governance* di lapangan. Melalui wawancara, peneliti ingin mengetahui:

- 1) Bagaimana masing-masing aktor (pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya yang terlibat) memahami dan menjalankan perannya dalam proses kolaborasi penanggulangan banjir rob.
- 2) Sejauh mana proses kolaborasi berjalan secara partisipatif, inklusif, dan efektif berdasarkan pengalaman dan persepsi para pihak.
- 3) Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mereka alami selama pelaksanaan program mitigasi banjir rob.

4) Dinamika komunikasi, koordinasi, dan kepemimpinan yang terjadi selama proses kolaboratif berlangsung.

2. Observasi

Observasi dilakukan di wilayah terdampak banjir rob, terutama di Kelurahan Tanjung Mas. Observasi ini bertujuan untuk memahami situasi nyata di lapangan, melihat interaksi antaraktor dalam pelaksanaan mitigasi, serta mendokumentasikan kondisi lingkungan, infrastruktur, dan respons masyarakat terhadap bencana yang terjadi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai bukti tertulis maupun visual yang mendukung analisis penelitian. Dokumen yang dikaji meliputi regulasi pemerintah terkait penanggulangan bencana (seperti UU No. 24 Tahun 2007 dan Perda Kota Semarang No. 13 Tahun 2010), laporan resmi dari BPBD, artikel media massa, serta arsip-arsip lain yang relevan. Teknik ini penting untuk melengkapi data primer serta memperkuat keabsahan temuan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengandalkan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, survei, dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih untuk menyesuaikan dengan keterbatasan akses lapangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber dokumentatif yang telah tersedia. Studi ini fokus pada implementasi *Collaborative Governance* dalam mitigasi banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang, dengan menggali peran serta interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya yang terlibat dalam proses kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wawancara semi-

terstruktur efektif dalam mengungkap persepsi, pengalaman, dan tantangan para aktor terkait partisipasi, efektivitas, serta dinamika koordinasi dan kepemimpinan dalam mitigasi bencana. Observasi lapangan memperkuat pemahaman tentang kondisi aktual dan respons masyarakat, sementara dokumentasi menyediakan landasan normatif dan evidensial yang memperkaya analisis. Secara keseluruhan, metode yang digunakan memungkinkan peneliti memperoleh gambaran menyeluruh mengenai praktik kolaboratif dalam penanggulangan banjir rob serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

1.7.6. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga teknik analisis data yang digunakan bersifat non-statistik dan lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap proses kolaborasi antar sektor dalam mitigasi bencana. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994), yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah dari lapangan ke dalam bentuk yang lebih terorganisir. Dalam konteks ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi akan diseleksi dan dirangkum untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting terkait implementasi *Collaborative Governance* dalam mitigasi banjir rob.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif, tabel, atau bagan tematik untuk memudahkan dalam melihat pola-pola kolaborasi yang terjadi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya yang terlibat. Penyajian ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam memahami hubungan antar data dan mempermudah penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Setelah data ditampilkan, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan kecenderungan yang muncul. Peneliti akan memverifikasi temuan tersebut melalui teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas data. Verifikasi dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung, guna menjaga akurasi dan konsistensi hasil.

1.7.7. Kualitas Data (*goodness criteria*)

Menurut Sugiyono (2018: 363), dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif, keabsahan data dapat dikatakan tercapai apabila tidak terdapat perbedaan antara data yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh peneliti dengan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan. Dalam memastikan kredibilitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi, Menurut Sugiyono (2018: 369-370) triangulasi dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan memverifikasi keabsahan data melalui perbandingan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber. Tujuan dari

teknik ini adalah untuk meningkatkan kredibilitas data dengan mengidentifikasi konsistensi informasi antar sumber yang berbeda.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan pendekatan yang menggunakan beberapa metode pengumpulan data terhadap sumber yang sama, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Meskipun teknik yang digunakan berbeda, data yang diperoleh dapat saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dari sudut pandang yang beragam.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan mengulang proses pengumpulan data menggunakan metode yang sama, namun pada waktu yang berbeda. Pendekatan ini menekankan pentingnya dimensi temporal dalam menjamin keakuratan dan konsistensi data, mengingat situasi dan kondisi dapat berubah seiring waktu.

Dalam kualitas data sangat ditentukan oleh tingkat keabsahan dan kredibilitas informasi yang dikumpulkan. Menurut Sugiyono (2018: 363), data dapat dikatakan sah apabila tidak terdapat perbedaan antara kondisi faktual di lapangan dengan hasil yang dilaporkan oleh peneliti. Untuk memastikan hal tersebut, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi yang mencakup triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2018: 369–370). Triangulasi sumber dilakukan untuk memverifikasi konsistensi data dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber, seperti aparat kelurahan, BPBD, tokoh masyarakat, dan sektor lainnya yang terlibat yang terlibat langsung dalam upaya mitigasi. Sementara itu, triangulasi teknik diterapkan melalui

kombinasi metode wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang sama, guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh. Adapun triangulasi waktu digunakan untuk menguji stabilitas data dengan cara mengumpulkan informasi dalam waktu yang berbeda, mengingat dinamika sosial dan lingkungan dapat memengaruhi respons maupun kondisi lapangan. Penerapan teknik triangulasi ini berperan penting dalam menjamin kualitas data yang mendasari analisis terhadap praktik *Collaborative Governance* dalam mitigasi banjir rob di Kelurahan Tanjung Mas. Dengan pendekatan ini, peneliti memperoleh gambaran yang valid, akurat, dan menyeluruh mengenai pola kerja sama antar pemangku kepentingan, tantangan koordinasi, serta efektivitas strategi mitigasi yang dijalankan di wilayah tersebut.